



LAPORAN AKUNTABILITAS INTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini sebagai wujud komitmen pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan selama tahun anggaran 2024 dalam melaksanakan tujuan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu **“Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan”**.

Upaya pencapaian tujuan tersebut didukung melalui pelaksanaan sasaran **“Meningkatnya Infrastruktur Yang Terpadu Dan Berkualitas”** dengan Indikator sasaran yang menjadi tanggung jawab oleh Dinas Perumahan dan Permukiman adalah **“ Presentase Permukiman Layak Huni”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2024.

Diharapkan penyajian LKjIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2024, dapat

menjadi bahan untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun, identifikasi, pembelajaran dan masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan balik bagi seluruh jajaran aparatur di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan serta meningkatkan kinerja lebih efektif dan efisien.

Balikpapan, 28 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

RAFIUDDIN, ST., MT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di urusan bidang Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, selalu berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang diimplementasikan dengan 4 (empat) Sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sepanjang tahun 2024. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, ditetapkan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024.

Adapun secara umum simpulan keberhasilan capaian kinerja tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. **Tujuan “ Meningkatkan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas,** dengan indikator **‘Persentase Permukiman Layak Huni,** terdapat realisasi sebesar 99,84% dari target 99,55% atau capaian sebesar 100,29% dengan **kriteria ”Melebihi Target”**.
- b. **Sasaran I “ Meningkatkan cakupan rumah layak huni”,** dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”,** dengan realisasi sebesar **99,88** dari target **99,89** sehingga capaian sebesar **99,98%** dengan **kriteria ”Tidak Tercapai”**.
- c. **Sasaran II “ Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai” dengan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”,** terdapat realisasi sebesar **24.56%** dari target **20.24%** atau capaian sebesar **121.34%** dengan **kriteria ”Melebihi Target”**.
- d. **Sasaran III“ Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh,** terdapat realisasi sebesar **88.35%** dari target **67.78%** atau capaian sebesar **130.36%** dengan **kriteria ”Melebihi Target”**.
- e. **Sasaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”,** dengan realisasi sebesar **74,25** dari target **75** sehingga capaian sebesar **99%,** dengan **predikat ”Tidak Tercapai”**.

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan. Keberhasilan sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap aparat di semua bidang, selain itu kerjasama dengan instansi terkait sangat diperlukan dalam mendukung program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Oleh karena itu pada capaian kinerja yang tidak tercapai, akan dievaluasi dan dianalisa penyebab dan tindak lanjutnya serta mengidentifikasi risiko dan dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan tindak pengendalian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	6
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1.4.2 Struktur Organisasi.....	8
1.4.3 Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Permukiman.....	9
1.4.4 Sasaran dan Prasarana Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	122
1.4.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	144
1.5 Sistematika Penulis	288
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Perencanaan Strategis.....	30
2.1.1 Visi dan Misi.....	30
2.1.2 Tujuan	31
2.1.3 Sasaran.....	32
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	355
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	422
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	544

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	544
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	57
3.2.1 Pencapaian Kinerja Target dan Realisasi Kinerja	588
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	677
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis ..	1044
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja).....	1088
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	1122
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	13131
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..	19293
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	Error! Bookmark not defined. 97
BAB IV PENUTUP	208

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	3
Tabel 1.2	Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Berdasarkan Pangkat Tahun 2024	10
Tabel 1.3	Daftar Barang Tahun 2024	12
Tabel 1.4	Barang Persediaan per tanggal 31 Desember 2024	14
Tabel 1.5	Isu – Isu dan Permasalahan Tahun 2024	14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel 2.2	Sasaran, Indikator, Definisi Operasional Rumus dan Target Indikator Sasaran	38
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	42
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	43
Tabel 2.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Tahun 2024	44

Tabel 3.1	Interval Capaian dan Predikat Kinerja	57
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	58
Tabel 3.3	Realisasi Penananganan Kawasan Permukiman Kumuh	64
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	68
Tabel 3.5	Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH Berdasarkan Sumber Dana Bantuan	77
Tabel 3.6	Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan	78
Tabel 3.7	Realisasi Penananganan Kawasan Permukiman Kumuh	95
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sampai Dengan Tahun 2024	97
Tabel 3.9	Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	99
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Penanganan Luasan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Tahun 2024	102
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Penyerahan PSU Perumahan Sampai Dengan Tahun 2024	103
Tabel 3.12	LHE SAKIP 2023	104

Tabel 3.13	Realisasi Kinerja Utama yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	105
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada standar Nasional sandingan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	108
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada standar Nasional Sandingan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	111
Tabel 3.16	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	112
Tabel 3.17	Tabel Faktor-Faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja	124
Tabel 3.18	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja	132
Tabel 3.19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	194
Tabel 3.20	Realisasi Program Anggran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	197
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2024	199

Tabel 5.1	Realisasi Anggaran Belanja Disperkim	210
	Kota Balikpapan Tahun 2024	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Sumber Renstra Disperkim		9
Gambar 3.1	Hasil LHE SAKIP Tahun 2023		54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Data Pendidikan		11
---------------	-----------------	-------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa salah satu fungsi pokok Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis di urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai mandat yang bersifat strategis yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
6. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.;

7. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota;
8. Penyelenggaraan PSU Perumahan;
9. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun Rumusan tujuan sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah:

TUJUAN 3

Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

Upaya pencapaian tujuan ini didukung melalui pelaksanaan sasaran **“Meningkatnya Infrastruktur Yang Terpadu Dan Berkualitas”** dengan Indikator sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman adalah

“Persentase Permukiman Layak Huni”

Berdasarkan Perencanaan dalam RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tersebut diatas, maka keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas
Perumahan dan Permukiman dengan RPJMD Kota
Balikpapan Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OR SASARAN
Misi Ke - 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai	Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indikator Tujuan 1 : Indeks Kepuasan Layanan Insfrasruktur	Sasaran 3.1: Meningkatnya Infrastruktur Yang Terpadu Dan Berkualitas	Indikat or sasaran 3.2: Presentase Permukiman Layak huni

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menetapkan strategi-strategi dalam melaksanakan fungsi urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menetapkan strategi-strategi dalam melaksanakan fungsi urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dan informasi publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan

dan Permukiman Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan manajemen SDM aparatur di Pemerintah Kota Balikpapan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024. Laporan kinerja ini merupakan tahun kesatu pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai pedoman penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, maka beberapa aturan terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup antara lain, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Nomor: 900/132/Disperkim Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan laporan kinerja ini bermaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan selama

kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan kinerja serta sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan di masa yang akan datang.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022, maka Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

I. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
- d. pengoordinasian penataan prasarana, sarana dan utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
- e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- g. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
- j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

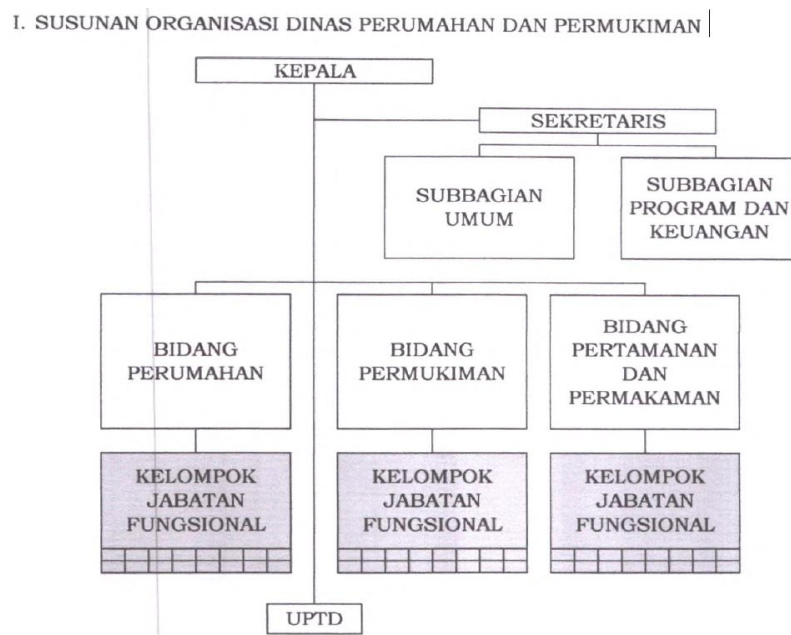
- k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- m. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- n. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- o. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- p. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
- q. pembinaan dan pengendalian UPTD;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan;

- c. Bidang Perumahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Permukiman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pertamanan dan Permakaman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Sumber Renstra Disperkim

1.4.3 Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Permukiman

Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tidak terlepas dari peran aktif dari SDM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan yang saling berkoordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun dukungan SDM aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan keadaan Desember 2024 sebanyak 32 orang, dengan klasifikasi berdasarkan pangkat, golongan, jenjang pendidikan, eselon dan gender sebagaimana dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

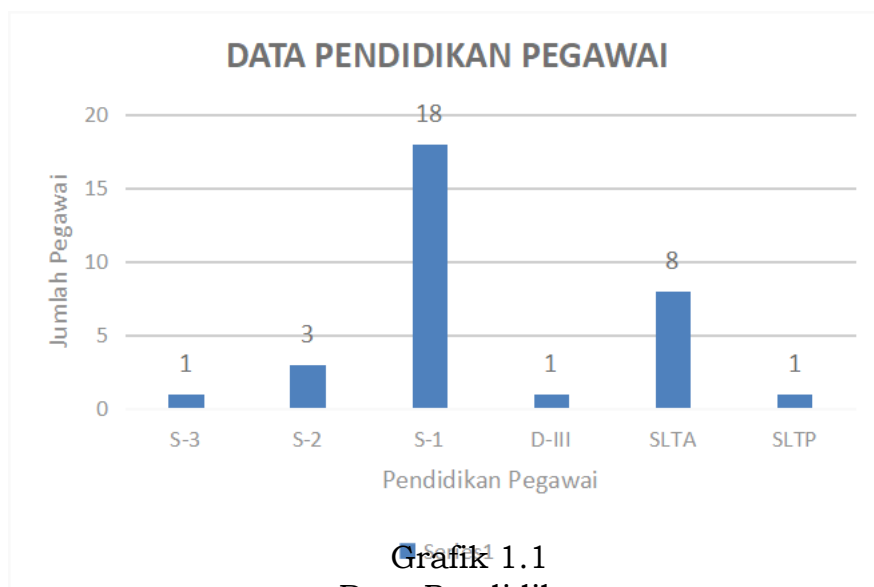
Tabel 1.2
Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Balikpapan
Berdasarkan Pangkat Tahun 2024

NO	Keterangan	PANGKAT/ GOL RUANG										L	P
		IV. c	IV. b	IV. a	III. d	III. c	III. b	III. a	II .d	II .c	II .a		
1	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1										1	
2	Pembina Tingkat I / (IV/b)		1									1	
3	Pembina / (IV/a)			2								1	1
4	Penata Tingkat I (III/d)				10							6	4
5	Penata / (III/b)						1						1
6	Penata Muda / (III/a)							8				4	4
7	Pengatur Tingkat I / (II/d)								2			1	1
8	Pengatur / (II/c)									2		1	1
9	Pengatur Muda / (II/a)										1	1	
10	IX											1	

NO	PANGKAT/ GOL RUANG											L	P
	Keterangan	IV. c	IV. b	IV. a	III. d	III. c	III. b	III. a	II. d	II. c	II. a		
11	IX											1	
12	IX											1	
13	IX											1	
	Jumlah	1	1	2	10		1	8	2	2	1	20	12

Sumber : Bagian Umum Disperkim Kota Balikpapan

Dari tabel 1.2. diketahui bahwa tahun 2024 jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan **Golongan** menunjukkan bahwa jumlah tertinggi pegawai golongan III sebanyak 21 orang.



Grafik 1.1
Data Pendidikan

Pada tahun 2024 jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan **Tingkat**

Pendidikan menunjukkan bahwa jumlah tertinggi pegawai dengan Pendidikan S1 sebanyak 18 orang.

1.4.4 Sasaran dan Prasarana Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, dan sarana pendukung pelayanan lainnya harus memadai dan sesuai standar pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Barang Tahun 2024

No	Spesifikasi Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Keterangan
			B	KB	RB	
1	2	3	4	5	6	7
1	CCTV System	2	1		1	
2	Mesin Absensi	2	1		1	
3	AC Split	20	14		6	
4	Meja rapat pejabat	1	1			
5	Serial Scanner/Printer	8	6		2	
6	P.C Unit	41	30		11	

No	Spesifikasi Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Keterangan
			B	KB	RB	
1	2	3	4	5	6	7
7	Lap Top	11	5		6	
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	58	32		26	
9	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	8			
10	MOBIL	5	5			
11	MOTOR	14	2	7		
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	8	2		
13	Tablet PC	1	1			
14	Printer (Peralatan Personal Komputer) PRINTER A3	3	3			
15	Lap Top	12	12			
16	Komputer P.C Unit	4	14			
17	TELEVISI	6	6			
18	Digital Camera	2	1	1		
19	METERAN DORONG DIGITAL / MEASURING WHEEL	5	5			
20	Microphone/Wireless MIC	1	1			
21	Alat Pemadam/Portable	4	4			
22	karpas	4	4			
23	Mic Conference	1	1			
24	A.C. Split	1	1			
25	Alat Penghancur Kertas	9	9			
26	Pompa Air	1	1			
27	MAESTRO BRANKAS 3	13	13			
28	CCTV - Camera Control Television System	1	1			
29	Mesin Pemotong Rumput	4	4			
30	Video Conference	1	1			
31	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2	2			
32	Sound System	2	2			
	Jumlah	258	199	10	53	

Adapun Laporan Persediaan dan Aset Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan per 31 Desember 2024 Adalah Sebagai Berikut:

- a. Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Persediaan (Stock Opname) Nomor : 036 / 0604 / BA – INVENTARISASI-PERSEDIAAN /DISPERKIM

Tabel 1.4
Barang Persediaan per tanggal 31 Desember 2024

No	Jenis Barang Persediaan	Pagu
1	Alat Tulis Kantor	Rp 669.000,00
2	Kertas dan Amplop	Rp 278.000,00
3	Tinta dan Cartridge	Rp 1.240.000,00
4	Peralatan dan Bahan Pembersih	Rp 1.575.201,00
5	Alat Listrik dan Penerangan	Rp 643.134,00
Jumlah Saldo Akhir		Rp 4.405.335,00

1.4.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Sesuai tugas dan fungsinya secara garis besar jenis pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, antara lain:

Tabel 1.5
Isu-isu dan Permasalahan Tahun 2024

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
Bidang Permukiman						
1	Masih terdapat rumah tidak	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2024	Rumah yang tidak sesuai dengan persyaratan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui	Sistem informasi penyediaan data RTLH	Menyediakan data atau informasi terkait Rumah

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
	layak huni sebanyak 151 unit	Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH)	dan standar	Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh.	Terintegrasi melalui Master Data Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Tidak Layak Huni yang dapat diakses oleh masyarakat juga terdapat data /informasi terkait pembangunan yang akan, sedang dan sudah dilakukan perbaikan/Peningkatan Kualitas.
2	Masih terdapat kawasan Kumuh	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kolaborasi dan Sinergi Penataan Permukiman Berkelanjutan.	Terdapat pembagian kewenangan penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan luasan, untuk kewenangan kota dengan luasan kurang dari 10 Ha. Sehingga masih terdapat luasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan luas 10 Ha-15 Ha dan Pemerintah Pusat lebih dari 15 Ha.	Melakukan Penanganan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dan melakukan tindakan pencegahan untuk Resiko munculnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Baru.	Penanganan dan Pencegahan Kumuh secara Kolaboratif melibatkan semua stakeholder dan pihak terkait.	Kolaborasi, sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait untuk terselenggaranya Penanganan Kumuh secara terpadu.

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
3	Dampak dari perpindahan IKN.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).	Potensi munculnya Kawasan kumuh Baru.	Pencegahan untuk menghindari munculnya Kawasan Kumuh baru akibat pertambahan penduduk.	Melibatkan Masyarakat secara langsung dan pendampingan oleh Tenaga Pendamping dalam meningkatkan kesadaran publik.	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
4	Pentingnya update data secara digital Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) terutama data RTLH pada kawasan Kumuh dan diluar Kumuh dan data permukiman kumuh.	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Belum tersedianya data lengkap rumah tidak layak huni yang terverifikasi dan update periodik secara digital.	Pelaksanaan <i>updating</i> data secara digital.	Penggunaan Aplikasi Satu Data Dinas Perumahan dan Permukiman.	Pengumpulan data atau informasi secara akurat dan tepat sasaran terkait perumahan dan permukiman kumuh yang dapat diakses oleh masyarakat juga terdapat data /informasi terkait pembangunan yang akan, sedang dan sudah dilakukan perbaikan/Peningkatan Kualitas yang dilakukan secara akuntabilitas/ transparan.
Bidang Perumahan						

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
1	Pentingnya update data perumahan, data rumah pada kawasan rawan bencana.	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Belum tersedianya data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara periodik.	a. Menyiapkan instrumen pendataan secara detail dan digital agar dapat menjangkau data yang lebih akurat. b. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghindari resistensi dari masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam pendataan rumah di kawasan rawan bencana. c. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam hal penyiapan data dukung/ data sekunder.	Pelaksanaan <i>updating</i> data secara periodik melalui SIM PKP.	
2	Perencanaan dan pengembangan perumahan yang belum optimal.	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016	belum sesuai perencanaan perumahan dengan data topografi/kontur kawasan perumahan dan data	a. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam hal pemberian rekomendasi dan perizinan bagi	Pengembangan Aplikasi Monitoring pengembangan perumahan	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
		tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	kepemilikan lahan, adanya alih fungsi pemanfaatan lahan non komersial di dalam kawasan perumahan, rendahnya pelaksanaan pengawasan pengembangan perumahan.	pengembangan b. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi <i>One Map One Data</i> dari DPPR dalam hal akses data sistem drainase dan sistem jaringan jalan c. Meningkatkan kapasitas SDM DISPERKIM melalui pelatihan dan pemberian dukungan fasilitas dalam pelaksanaan pengawasan d. Menyiapkan instrumen pengawasan secara detail dan digital agar dapat memberikan informasi pengawasan yang lebih informatif dan kredibel e. Melibatkan pemerintah setempat (Kelurahan, Kecamatan dan RT) dalam memberikan informasi	terintegrasi.	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
				terkait pengembangan perumahan		
3	Perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai;	- Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman - PERMENSO S No. 6/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan	Belum optimalnya penyediaan rumah yang memenuhi standar rumah layak huni serta fasilitas PSU dalam kawasan perumahan dan permukiman yang belum memadai	a. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam hal pemberian rekomendasi dan perizinan bagi pengembangan b. Melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, baik dalam hal perencanaan, pembangunan maupun pengawasan	Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
		Sarana Prasarana Lingkungan				
4	Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun/vertical di masih di tempat yang jauh dari perkotaan;	- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (mengubah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun) - PP No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Adanya peningkatan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan pemukiman	a. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam hal penyiapan lahan/land banking untuk pembangunan RUSUNAMI atau RUSUNAWA bagi masyarakat berpenghasilan rendah b. Melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, baik dalam hal perencanaan maupun pengawasan dalam pemberian manfaat kepada masyarakat	Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;	Target inovasi TA.2026
5	Masih adanya masyarakat yang membeli rumah	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait data perumahan	melaksanakan publikasi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Sistem informasi penyediaan data secara elektronik melalui	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
	tidak berizin	Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	yang berizin	dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat	Master Data Perumahan Berizin di Kota Balikpapan melalui aplikasi SIM PKP	
6	Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	a. PERMEN DAGRI No. 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal b. PERMEN PUPR No. 13/2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	a. Belum tersedianya Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan b. Belum optimalnya informasi kepada perangkat pemerintah setempat dan masyarakat terkait adanya layanan SPM Bidang Perumahan Rakyat	a. Melakukan koordinasi ke Bagian Hukum dalam percepatan pengesahan dokumen Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan b. Penyediaan sistem Informasi berbasis Website yang sistematis untuk membantu masyarakat guna pelayanan seperti Informasi Rumah terdampak Bencana dan Rumah Sewa di Kota Balikpapan	Layanan Pelaporan Kerusakan Rumah Akibat Bencana Online	Target inovasi TA.2026

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
				sehingga akses Informasi lebih mudah dan informatif.		
7	Belum tersedianya wadah untuk melindungi hak dan kewajiban penghuni RUSUNAMI	PERMEN PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun	Belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di RUSUNAMI	melaksanakan sosialisasi secara langsung dan melalui media sosial terkait pentingnya dan manfaat dari terbentuknya P3SRS bagi pemilik/ penghuni RUSUNAMI	layanan konsultasi / pendampingan bagi masyarakat dan pengembangan RUSUNAMI dalam pembentukan P3SRS	
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa	- PP No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Kurangnya SDM di UPTD Rusunawa	Penyediaan SDM untuk pekerjaan operasional dan perawatan hunian RUSUNAWA melalui <i>Outsourcing</i>		
9	Peningkatan pelayanan penghuni rusunawa	- PP No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Belum terintegrasinya data <i>realtime</i> jumlah penghunian yang dapat diakses oleh masyarakat umum	Pengembangan fitur aplikasi SIM-PKP dalam hal layanan penghunian rusunawa Kota Balikpapan	Aplikasi SIMRUSUN	
Bidang Pertamanan dan Permakaman						
1	Pentingnya update data perumahan, data rumah pada kawasan rawan bencana.	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang	Belum tersedianya data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara	d. Menyiapkan instrumen pendataan secara detail dan digital agar dapat menjangkau data yang lebih akurat e. Meningkatkan	Pelaksanaan <i>updating</i> data secara periodik melalui SIM PKP	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
		Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	periodic	n komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghindari resistensi dari masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam pendataan rumah di kawasan rawan bencana f. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam hal penyiapan data dukung/data sekunder		
2	Perencanaan dan pengembangan perumahan yang belum optimal	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	belum sesuainya perencanaan perumahan dengan data topografi/kontur kawasan perumahan dan data kepemilikan lahan, adanya alih fungsi pemanfaatan lahan non komersial di dalam kawasan perumahan, rendahnya pelaksanaan	f. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam hal pemberian rekomendasi dan perizinan bagi pengembangan perizinan bagi pengembangan pemanfaatan aplikasi One Map One Data dari DPPR dalam hal akses data sistem g. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi One Map One Data dari DPPR dalam hal akses data sistem	Pengembangan Aplikasi Monitoring pengembangan perumahan terintegrasi	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
			pengawasan pengembangan perumahan	drainase dan sistem jaringan jalan h. Meningkatkan kapasitas SDM DISPERKIM melalui pelatihan dan pemberian dukungan fasilitas dalam pelaksanaan pengawasan i. Menyiapkan instrumen pengawasan secara detail dan digital agar dapat memberikan informasi pengawasan yang lebih informatif dan kredibel j. Melibatkan pemerintah setempat (Kelurahan, Kecamatan dan RT) dalam memberikan informasi terkait pengembangan perumahan		
3	Perizinan dan pemenuhan standar keandalan	- Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan	Belum optimalnya penyediaan rumah yang memenuhi standar rumah layak huni	c. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam hal pemberian rekomendasi	Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
	bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.	Permukiman - PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman - PERMENSO S No. 6/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan	serta fasilitas PSU dalam kawasan perumahan dan permukiman yang belum memadai	dan perizinan bagi pengembangan d. Melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, baik dalam hal perencanaan, pembangunan maupun pengawasan	terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;	
4	Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun/vertikal di	- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (mengubah UU No. 20	Adanya peningkatan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan permukiman	c. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam hal penyiapan lahan/land banking untuk pembangunan	Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;	Target inovasi TA.2026

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
	masih di tempat yang jauh dari perkotaan.	Tahun 2011 tentang Rumah Susun) - PP No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun		an RUSUNAMI atau RUSUNAWA bagi masyarakat berpenghasilan rendah d. Melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, baik dalam hal perencanaan maupun pengawasan dalam pemberian manfaat kepada masyarakat		
5	Masih adanya masyarakat yang membeli rumah tidak berizin.	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait data perumahan yang berizin.	melaksanakan publikasi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.	Sistem informasi penyediaan data secara elektronik melalui Master Data Perumahan Berizin di Kota Balikpapan melalui aplikasi SIM PKP.	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
6	Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.	c. PERMEN DAGRI No. 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. d. PERMEN PUPR No. 13/2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.	c. Belum tersedianya Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan d. Belum optimalnya informasi kepada perangkat pemerintah setempat dan masyarakat terkait adanya layanan SPM Bidang Perumahan Rakyat.	c. Melakukan koordinasi ke Bagian Hukum dalam percepatan pengesahan dokumen Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan d. Penyediaan sistem Informasi berbasis Website yang sistematis untuk membantu masyarakat guna pelayanan seperti Informasi Rumah terdampak Bencana dan Rumah Sewa di Kota Balikpapan sehingga akses Informasi lebih mudah dan informatif.	Layanan Pelaporan Kerusakan Rumah Akibat Bencana Online.	Target inovasi TA.2026
7	Belum tersedianya wadah untuk melindungi	PERMEN PUPR Nomor 23/PRT/M/2018	Belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni	melaksanakan sosialisasi secara langsung dan melalui media	layanan konsultasi / pendampingan bagi	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
	gi hak dan kewajiban penghuni RUSUNAMI.	Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.	Satuan Rumah Susun (P3SRS) di RUSUNAMI.	sosial terkait pentingnya dan manfaat dari terbentuknya P3SRS bagi pemilik/ penghuni RUSUNAMI.	masyarakat dan pengembangan RUSUNAMI dalam pembentukan P3SRS.	
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa.	- PP No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.	Kurangnya SDM di UPTD Rusunawa.	Penyediaan SDM untuk pekerjaan operasional dan perawatan hunian RUSUNAWA melalui <i>Outsourcing</i> .		
8	Peningkatan pelayanan penghuni rusunawa.	- PP No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.	Belum terintegrasinya data <i>realtime</i> jumlah penghunian yang dapat diakses oleh masyarakat umum.	Pengembangan fitur aplikasi SIM-PKP dalam hal layanan penghunian rusunawa Kota Balikpapan.	Aplikasi SIMRUSUN	

Sumber: Bidang Permukiman, Bidang Perumahan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

1.5 Sistematika Penulis

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara singkat latar belakang penyusunan LAKIP, Struktur organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta permasalahan utama.

II. Bab II Perencanaan Kinerja

Membuat Rencana Strategis 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

III. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Membuat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

IV. Bab IV Penutup

Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi

Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Nomor: 900/132/Disperkim Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Adapun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih merupakan Visi dan Misi Perangkat Daerah. Adapun visi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 masih melanjutkan, memperkuat dan memantapkan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode sebelumnya, yaitu:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Pada misi tersebut urusan bidang perumahan dan permukiman terkait dengan misi ke-3 yaitu **“Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai”**. Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

2.1.2 Tujuan

Adapun Tujuan Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 adalah Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan

menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk mencapai tujuan RPJMD Kota Balikpapan dijabarkan dengan sasaran meningkatnya infrastruktur yang memadai dan berkualitas dengan indikator indeks pembangunan infrastruktur dan persentase permukiman layak huni. Sasaran RPJMD ini menjadi Tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yaitu:

Meningkatnya Infrastruktur Yang Memadai dan Berkualitas

2.1.3 Sasaran

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026, didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program maupun penyediaan rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni.

2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Daerah.
3. Berkurangnya luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.
4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim.

Adapun matrik Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan	Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah total Unit Rumah Kota	0.00 %	0.01 %	0.02 %	0.03 %	0.04 %

NO	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
			rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan	dikali 100%					
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah total unit rumah kota dikali 100%	16.75%	16.80%	22.50%	23.00%	23.50%
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha.	Jumlah Kawasan Kumuh Kota dibagi Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN dikali 100%	32.56%	51.47%	67.78%	84.08%	100.00%
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	27.00	28,75	32,25	32,25	34.00

Sumber: Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pada tahun 2023 terdapat perubahan rumusan perhitungan indikator sasaran berdasarkan Berita Acara Hasil Koordinasi dan Asistensi Hasil Perubahan Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang di tandatangani pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan Inspektorat Kota Balikpapan, yaitu terdapat terdapat perubahan definisi operasional, rumus hitung dan target kinerja di tahun 2023-2026 berdasarkan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Surat Edaran Sekretaris Dearah Nomor 060.4/01799/Org Tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023;
3. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

Adapun Perubahan Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Pada IKU “Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni awal target Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni”, pada IKU awal hanya menghitung penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah menjadi jumlah Unit Rumah Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, dapat mengacu pada data e-RTLH.
2. Pada IKU “ Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU” , bahawa terdapat perubahan Definisi Operasional, Rumus hitung dan Target Kinerja di Tahun 2023-2026 karena pada IKU awal target pembanding adalah Jumlah total unit rumah kota baik swadaya maupun formal di Kota Balikpapan sehingga menjadi jumlah unit rumah di dalam perumahan formal (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
3. Pada IKU” Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh” , Terdapat perubahan kalimat pada Sasaran, Indikator, Rumus hitung dan target di Tahun 2023-2026 karena pada IKU awal target perbandingan adalah Jumlah Kawasan Kumuh Kota terhadap Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN menjadi Jumlah Kawasan Kumuh Kota Yang ditangani terhadap (Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

4. Pada IKU “ Nilai SAKIP Disperkim”, terdapat perubahan sasaran, indikator sasaran yang sebelumnya adalah nilai Reformasi birokrasi menjadi nilai SAKIP Disperkim. Hal ini sesuai dengan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa karena nilai reformasi birokrasi sudah tidak dilakukan perhitungan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Adapun sasaran, indikator sasaran, formulasi rumus hitung dan target pada Perubahan Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Sasaran, Indikator, Definisi Operasional Rumus dan Target
Indikator Sasaran

No	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatn ya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Mengukur persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Jumlah Unit Rumah Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, dapat mengacu pada data e-RTLH.	Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah total Unit Rumah Kota dikali 100%	99.78%	99.83%	99.95%	100%	akan mengguna kan Baseline baru di pendataan tahun 2024 karena rencana sudah tercapai di tahun 2025

No	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/ developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah total unit rumah kota dikali 100%	6.17%	12.18 %	18.18%	28.26%	36.42%

No	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
			dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal						
3	Berkurangn ya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangn ya luas kawasan kumuh	mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha.	Jumlah Kawasan Kumuh Kota Yang Ditangani dibagi Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN dikali 100%.	32.56%	51.47 %	67.78%	84.08%	100.00%

No	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74.00	75.00	76.00	78.00	80.00

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan sasaran, indikator kinerja, target, program, dan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.95
2.	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	18.18
3	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	67.78
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Disperkim	Nilai	76.00

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.300.932.000	APBD
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11.385.000.000	APBD
3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10.400.000.000	APBD

4.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.550.000.000	APBD
----	--	----------------------	-------------

Tabel 2.4

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.89%
2.	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	20.24%
3	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	67.78%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Disperkim	Nilai	75.00

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12,554,944,916.00	APBD-P
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12,885,468,000,00	APBD-P
3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4,939,918,934.00	APBD-P
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3,666,200,000.00	APBD-P

5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11,612,485,600.00	APBD-P
----	--	--------------------------	---------------

Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan terdapat alokasi pagu sebesar **Rp.38.735.932.000,-** kemudian menjadi **Rp.45.659.017.045,-** melalui mekanisme perubahan. Target pendapatan asli daerah yang dikelola Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.2.800.000.000,-** .

Dalam melaksanakan amanat untuk mencapai target kinerja sasaran strategis tahun 2024, terdapat 5 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran
Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan cakupan rumah layak huni	1 Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	99.98%	1.1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12,885,468,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
				1.1 .1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	225,000,000
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	75,000,000
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100,000,000
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000
				1.1 .2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	335,000,000
				Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas. Tim Pendamping dan Fasilitator	75,000,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3		4	5	6
					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100,000,000
					Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60,000,000
					Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	100,000,000
					1.1 .3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1,353,820,000
					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1,000,000,000
					Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,000,000
					Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten /Kota	253,820,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
				1.1 .4 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	7,940,958,000
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5,954,448,000
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,986,510,000
				1.1 .5 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2,930,690,000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2,780,690,000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	100,000,000
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50,000,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu
1	2	3	4	5		6
				1.1.6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	100,000,000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	100,000,000
2	Meningkatnya Prasarana . Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	2 Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	100%	2.1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11,612,485,600
				2.1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11,612,485,600
					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	110,083,600
					Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11,260,906,000
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan	241,496,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	3 Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	131.71 %	3.1 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4,939,918,934
				3.1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	478,596,634
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	478,596,634
				3.1.2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	574,200,000
				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	85,000,000
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	71,000,000
				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	418,200,000
				3.1.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3,887,122,300

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	834,362,100
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50,000,000
				Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	308,426,600
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan	1,760,000
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	2,692,573,600
				3.2 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3,666,200,000
				3.2.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3,666,200,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	351,200,000
				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3,315,000,000
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	4 Nilai Sakip Disperkim	99%	4.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,554,944,916
				4.1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,590,174,566
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,590,174,566
				4.1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,025,892,500
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30,892,500
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	995,000,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu
1	2	3	4	5		6
					Undangan	
				4.1 .2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,008,128,050
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,980,000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418,864,100
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112,283,950
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410,000,000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,000,000
				4.1 .3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439,523,200
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	395,920,200
					Pengadaan Mebel	43,603,000
				4.1 .4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925,365,600

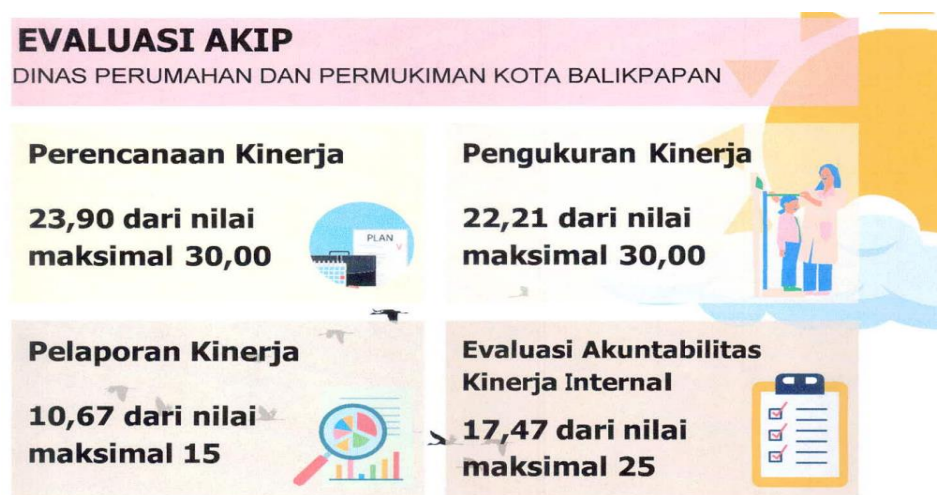
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	215,000,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710,365,600
				4.1 .5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,565,861,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349,931,600
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124,216,000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95,425,800
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,996,287,600
				Jumlah Keseluruhan	45,659,017,450

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Adapun hasil evaluasi atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Hasil LHE SAKIP Tahun 2023

Nilai total 74.25 dengan predikat BB-(Sangat Baik), dengan rekomendasi dari Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai terkait pemahaman dan komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
 - b. Agar melakukan revaluasi kembali atas target indikator agar target kinerja lebih menantang.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan strategi guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Kinerja

- a. Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.

Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan rapat internal secara berkala dengan memberikan informasi terkait rencana strategis Disperkim Tahun 2021-2026.
- b. Melakukan survei internal kepada pegawai terkait tingkat pemahaman SAKIP.
- c. Melakukan pendampingan penyusunan cascading kinerja dengan SKP pegawai
- d. Melakukan revaluasi kembali atas target indikator sesuai dengan update data terkini urusan perumahan dan permukiman.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan rapat internal untuk monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut capaian kinerja secara berkala.
- b. Melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan strategi guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan rapat internal terkait laporan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
- b. Melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Kinerja

Melaksanakan rapat internal secara intensif terkait isu-isu terkini bidang perumahan dan permukiman dalam mencapai target kinerja dan kendala yang di hadapi selanjutnya menindaklanjuti rencana aksi untuk menangani permasalahan dalam mencapai target kinerja.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Angka maksimum capaian setiap IKU sebesar 100%
3. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran *instrument standart* pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interval Capaian dan Predikat Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Pedoman Penyusunan LKJIP

3.2.1 Pencapaian Kinerja Target dan Realisasi Kinerja

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2024 yang disusun berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama, Indikator Kinerja Kunci (IKK), satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

a. Realisasi Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	Persen	99.55	99.84	100.29	Melebihi Target

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.89	99.88	99.98	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	20.24	24.56	121.34	Melebihi Target
3	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	67.78	88.35	130.36	Melebihi Target
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	Nilai	75.00	74.25	99.00	Tidak Tercapai

Pada tabel diatas diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator tujuan dan indicator kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian sebagai berikut:

a. Tujuan “ Meningkatkan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas, dengan indikator **‘Persentase Permukiman Layak Huni,** terdapat realisasi sebesar **99,84%** dari target **99,55%** atau capaian sebesar 100.29 % dengan **predikat” Melebihi Target”**.

b. Sasaran I “ Meningkatkan cakupan rumah layak huni”, dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”,** dengan realisasi sebesar **99,88%** dari target **99,89%** sehingga

capaian sebesar **99.98%** dengan **predikat**” **Tidak Tercapai**”.

c. Sasaran II “ Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai” dengan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”, terdapat realisasi sebesar **24.56%** dari target **20.24 %** atau capaian sebesar **121,34%** dengan **predikat**” **Melebihi Target**”.

d. Sasaran III” Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” **dengan Indikator** ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **88,35%** dari target **67.78%** atau capaian sebesar **130.36%** dengan **predikat**” **Melebihi Target**”.

e. Sasaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dengan realisasi sebesar **74,25** dari target **75** sehingga capaian sebesar **99%**, dengan **predikat**” **Tidak Tercapai**”.

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tujuan **“Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas”** dengan indikator ‘Persentase Permukiman Layak Huni, terdapat realisasi sebesar 99,84% dari target 99,55% atau capaian sebesar 100.29% dengan **predikat**” **Melebihi Target**”. Target tahun 2024 untuk luasan kawasan permukiman yang layak huni 10.798,10 Ha di banding luas seluruh kawasan permukiman

10.902 Ha, adapun realisasi penanganan kumuh pada tahun 2024 sebesar 79.03 Ha atau sebesar 83.02 Ha sampai dengan tahun 2024 sesuai SK Tahun 2023 sehingga kawasan permukiman yang layak huni sebesar 10.884,14 Ha. Penilaian realisasi berdasarkan renstra dengan target penyelesaian kawasan permukiman kumuh seluas 153.3 Ha sesuai SK Tahun 2020. Realisasi indikator kinerja dapat di hitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & \quad \text{Luas} & \quad \text{Kawasan} & & \text{X} \\
 \text{Permukiman} & \quad \text{Permukiman Layak huni} & & & 100 \\
 \text{Layak Huni} = & \quad \frac{\text{Luas} & \quad \text{Kawasan}}{\text{Permukiman}} & & \% \\
 & = \frac{10.902 - (153.3 - 1.12 - 38.48 - 12.82 - 83.02)}{109.02} & & & \text{X}100 \\
 & = 99.84\% & & & \%
 \end{aligned}$$

2. Pada Sasaran I **“Meningkatnya cakupan rumah layak huni”**, dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”**, dengan realisasi sebesar **99,88%** dari target **99,89%** sehingga capaian sebesar **99.98%** dengan **predikat” Tidak Tercapai”**. Pada target tahun 2024 terdapat 202.323 rumah layak huni dari total 202.539 unit rumah se- Kota Balikpapan (RP3KP). Hal ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan dalam Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2024 Kota Balikpapan dengan target

sebanyak 135 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 100 Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 1.88.45-371/2024 dan Nomor 1.88.45-437/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024. Total sampai dengan tahun 2024 sebanyak 266 unit melalui APBD sehingga masih terdapat target sampai dengan tahun 2026 sebanyak 251 Unit rumah.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & \quad \frac{\text{Jumlah penyediaan}}{\text{Jumlah total unit}} \times 100 \\
 \text{rumah layak} & \quad \frac{\text{rumah layak huni}}{\text{rumah Kota}} \times 100 \\
 \text{huni} = & \quad \frac{\text{Balikpapan}}{\text{Balikpapan}} \times 100 \\
 & \quad = \frac{202.323}{202.539} \times 100 \% \\
 & \quad = 99.88\%
 \end{aligned}$$

3. Pada sasaran II **“Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai” dengan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”,** terdapat realisasi sebesar **24.56%** dengan **predikat” Melebihi Target”**, dengan capaian sebesar **121.34%**, namun masih banyak PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan data, Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan sebesar 10.235 unit rumah Balikpapan dari 41.670 unit rumah pada perumahan. Terdapat 6 perumahan yang sudah di serahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan yaitu:

- 1) Balikpapan Baru
- 2) Balikpapan Permai
- 3) Tamansari Bukit Mutiara Perumahan
- 4) Balikpapan Regency
- 5) Pesona Bukit Batiuah I
- 6) Pesona Bukit Batuah 2

Perhitungan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”, terdapat realisasi sebesar 24.56% dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU} = \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah dalam}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{perumahan}}{10.235} \\
 & = \frac{\quad}{41.670} \times 100 \% \\
 & = 24.56 \%
 \end{aligned}$$

4. Pada sasaran III **“Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh’**, terdapat realisasi sebesar 88.35% dari target 67.76% dengan kriteria penilaian realisasi **predikat” Melebihi Target”**. atau capaian penanganan Kawasan kumuh sampai dengan Tahun 2024 sebesar 83.02 Ha atau sisa 21,67 Ha dari total luasan 104.69 Ha sesuai Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.

Tabel 3.3
Realisasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Kelurahan	Luas berdasarkan SK 2023	Luas Penangan Yang Telah dilakukan	Sisa Luas
1	Sepinggan raya	3.81	0	3.81
2	Gunung Sari Ulu	19.23	19.23	0
3	Gunung Sari Ulu	4.37	4.37	0

No	Kelurahan	Luas berdasarkan SK 2023	Luas Penangan Yang Telah dilakukan	Sisa Luas
4	Gunung Sari Ulu	17.65	5.22	12.43
5	Karang Jati	4.53	4.53	0
6	Karang Jati	16.11	13.6	2.51
7	Karang Jati	11.39	11.39	0
8	Karang Rejo	1.56	1.56	0
9	Karang Rejo	0.58	0.58	0
10	Klandasan Ilir	10.39	7.47	2.92
11	Damai	3.99	3.99	0
12	Baru Ilir	6.34	6.34	0
13	Baru Ilir	1.18	1.18	0
14	Baru Ilir	3.56	3.56	0
	Total	104.69	83.02	21.67

Sumber data: Bidang Permukiman

Indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **88.35%** diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh} &= \frac{\text{Jumlah Luasan Kawasan Kumuh Kotayang ditangani}}{\text{Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN}} \times 100 \% \\
 &= \frac{135.44 \text{ Ha}}{153,30 \text{ Ha}} \times 100 \% \\
 &= 88.35\%
 \end{aligned}$$

5. Pada sasaran IV **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah predikat” Tidak Tercapai”**. karena nilai LHE

atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 sebesar 74.25 . Adapun penilaian setiap komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,77	23,90
2	Pengukuran Kinerja	30	21,69	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,39	10,67
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	16,71	17,47

Sumber Data: LHE SAKIP

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat kenaikan pada setiap komponen nilai. Terdapat saran rekomendasi dari Inspektorat yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam rangka mengefektifkan penerapan AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai terkait pemahaman dan komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- b. Agar melakukan reviu kembali atas target indikator agar terget kinerja lebih menantang.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja sehingga dapat

dijadikan pedoman untuk menentukan strategi guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Kinerja

- a. Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan tujuan untuk melihat keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektivitas dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana, prasarana, metode kerja dan hal-hal lain yang terkait.

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

a. Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	capaian	Realisasi	capaian	Realisasi	capaian	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Berbeda IKU				99.83%	100%	99.88	99.98
2	Meningkatnya Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Berbeda IKU				12.18%	84%	24.56	121.34

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	capaian	Realisasi	capaian	Realisasi	capaian	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Berkurangnya luas awasan kumuh	Persentase berkurangn ya luas kawasan kumuh					36.80%	71%	88.35	130.36
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM					72.55	96.73%	74.25	99.00

Pada tahun 2023 terdapat perubahan rumusan perhitungan indikator sasaran berdasarkan Berita Acara Hasil Koordinasi dan Asistensi Hasil Perubahan Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang di tandatangani pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan Inspektorat Kota Balikpapan, yaitu terdapat terdapat perubahan definisi operasional, rumus hitung dan target kinerja di tahun 2023-2026 berdasarkan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Surat Edaran Sekretaris Dearah Nomor 060.4/01799/Org Tanggal 22 Desember 2023 Perihal

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023;

3. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Adapun Perubahan Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Pada IKU “Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni awal target Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni”, pada IKU awal hanya menghitung penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah menjadi jumlah Unit Rumah Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, dapat mengacu pada data e-RTLH.
- b. Pada IKU “ Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU” , bahawa terdapat perubahan Definisi Operasional, Rumus hitung dan Target Kinerja di Tahun 2023-2026 karena pada IKU awal target pembandingan adalah Jumlah total unit rumah kota baik swadaya maupun formal di Kota Balikpapan sehingga menjadi jumlah unit rumah di dalam perumahan formal (Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

- c. Pada IKU” Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh” , Terdapat perubahan kalimat pada Sasaran, Indikator, Rumus hitung dan target di Tahun 2023-2026 karena pada IKU awal target perbandingan adalah Jumlah Kawasan Kumuh Kota terhadap Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN menjadi Jumlah Kawasan Kumuh Kota Yang ditangani terhadap (Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
- d. Pada IKU “ Nilai SAKIP Disperkim”, terdapat perubahan sasaran, indikator sasaran yang sebelumnya adalah nilai Reformasi birokrasi menjadi nilai SAKIP Disperkim. Hal ini sesuai dengan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa karena nilai reformasi birokrasi sudah tidak dilakukan perhitungan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Pada tabel 3.4 diatas diperoleh sandingan capaian kinerja kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian dari tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2021

a.Realisasi pencapaian indikator sasaran yaitu persentase berkurangnya luas Kawasan kumuh sebesar 0 % diperoleh dari:

$$\text{Persentase berkurangnya} = \frac{\Sigma \text{ Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Kawasan kumuh}} \times 100\%$$

Σ Rencana Luasan Kawasan Permukiman pada RTRW

$$= \frac{0}{11.500} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

$$= 0\%$$

% Pencapaian Kinerja = tidak ada pencapaian kinerja

Realisasi sebesar 0 % pada indikator kinerja utama penurunan luasan kawasan kumuh dikarenakan pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan telah dinyatakan bebas kumuh berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan sebesar 0 ha dari sisa 58,58 ha berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No.188.45-285/2019 tanggal 18 September

2019. Atas dasar SK tersebut, maka tidak ada kegiatan dengan tuntutan kinerja penurunan luasan kawasan kumuh diatas skor kumuh 19. Meskipun nilai skor kumuh sudah dibawah 19, masih terdapat tugas Disperkim dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar air minum dan prasana dan sarana pengelolaan air limbah.

Atas dasar hal tersebut, kegiatan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2021 hanya berupa penanganan kumuh dibawah skor kumuh 19 yang terdiri atas:

1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.853.467.000,00 yang berasal dari DAK
2. Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan anggaran Rp. 437.000.000,00 dan terealisasi Rp. 404.783.470,00. Kegiatan ini terdiri terdiri atas penyusunan dokumen RP2KPKPK dan Pendampingan DAK.

Pada tahun 2020, kembali dikeluarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45- 326/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan tanggal 20 November 2020. SK ini memuat kawasan permukiman kumuh baru di Kota Balikpapan. Kawasan permukiman kumuh baru ini baru akan ditangani pada RPJMD atau Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman periode 2021-2026 dengan berbagi kewenangan bersama- sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan adalah terdapatnya pengurangan prasarana pengelolaan air limbah berupa sambungan rumah yang telah diupayakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dikarenakan kurangnya pengawasan pihak berwenang di wilayah prasarana tersebut. Kurangnya pengawasan dan evaluasi ini menyebabkan rendahnya tingkat pemeliharaan prasarana pengelolaan air limbah oleh masyarakat pengguna sistem terpusat. Diperlukan penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sanitasi secara berkelanjutan dari pihak- pihak terkait agar Prasarana pengelolaan air limbah yang telah terpasang tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik.

- b. Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase Penurunan *Backlog* Perumahan sebesar 147,77% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Backlog} &= \frac{\Sigma \text{ Backlog}}{\Sigma \text{ Rumah}} \times 100\% \\ &= \frac{94.039}{240.079} \times 100\% \\ &= 39,17 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{75 - (39,17 - 75)}{75} \times 100\% \\ &= 147,77 \%\end{aligned}$$

APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Alokasi anggaran APBN maupun APBD untuk sektor perumahan, masih rendah
- b. Realisasi jumlah unit rumah yang terfasilitasi dengan pembiayaan KPR FLPP masih relatif rendah
- c. Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penurunan rumah tidak layak huni sebesar 165,48% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penurunan Rumah tidak layak huni} &= \frac{\Sigma \text{ Rumah Tidak Layak Huni}}{\Sigma \text{ Rumah}} \times 100\% \\
 &= \frac{630}{240.079} \times 100\% \\
 &= 0,26\% \\
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{0,83 - (0,26 - 0,83)}{0,83} \times 100\% \\
 &= 168,67\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data terbaru dari pekerjaan pendataan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2021 diperoleh hasil bahwa terdapat 630 rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan. Ini artinya dari target 1.015 RTLH di tahun 2021 ternyata menurut data terakhir bidang permukiman tahun 2021 hanya tersisa tersisa 630 unit.

Pencapaian target kinerja tersebut diakomodir melalui kegiatan:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 1.864.511.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.835.926.575,00. Kegiatan ini bersumber dari DAK . Kegiatan ini meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 91 unit rumah.
2. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 100 unit rumah.

3. Bantuan dari Pemerintah Pusat dengan sumber dana APBN sebanyak 159 unit rumah.

Tabel 3.5
Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH Berdasarkan Sumber Dana Bantuan

No	Sumber Dana	Jumlah Rumah
1	DAK	91
2	APBN	159
3	Provinsi Kalimantan Timur	100

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Hasil verifikasi calon penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. Proses verifikasi dilakukan dengan teliti, sehingga tidak ada calon penerima bantuan yang mengundurkan diri saat kegiatan sudah berjalan.
2. Kerjasama semua pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.
 - a. Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penyediaan taman kota sebesar 526 % dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari :

$$\text{Persentase penyediaan} = \frac{\Sigma \text{ Luas Taman Kota}}{\Sigma \text{ Luas Kawasan Perkotaan}} \times 100\%$$

Tamankota
(354,62km²)

$$= \frac{340.396}{354.620.000} \times 100\%$$

$$= 0,10\%$$

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{0,10}{0,022} \times 100\%$$

$$= 454,55 \%$$

Pencapaian target kinerja penyediaan taman kota berhasil memenuhi target sebesar 454,55 %. Keberhasilan pencapaian yang besar terhadap penyediaan taman kota ini dikarenakan adanya penyerahan PSU berupa RTH di Perumahan Balikpapan Permai dan di Perumahan Balikpapan Baru kepada Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2020.

Berikut jumlah keseluruhan RTH di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3.6
Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan

	Kecamatan	Luas (m ²)
1	Balikpapan Tengah	6.201
2	Balikpapan Utara	56.595,95
3	Balikpapan Selatan	235.897
4	Balikpapan Timur	30.400
5	Balikpapan Barat	416,21
6	Balikpapan Kota	10.886
J U M L A H		340.396,16

Adapun kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian target kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, dengan anggaran Rp. 23.550.590.916,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.067.980.840,38 (93,71%). Kegiatan ini mengakomodir peningkatan sarana dan prasana taman kota Balikpapan, peningkatan sarana dan prasarana pembibitan tanaman hias/ peneduh.
2. Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman 104,17% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari:

Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman

$$= \frac{\Sigma \text{Ahli waris yang merasa puas}}{\Sigma \text{Ahli waris yang mengajukan pelayanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.261}{2.261} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{100}{98} \times 100\%$$

$$= 102,4 \%$$

$$= 102,4 \%$$

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang

meliputi kegiatan operasional pendukung pemeliharaan permakaman di kota Balikpapan.

Backlog perumahan diartikan sebagai suatu kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, *backlog* Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. *Backlog* Perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah persatu rumah tangga atau kepala keluarga.

Data *backlog* kepemilikan rumah kota Balikpapan tahun 2021 sebesar 94.039 unit, menggambarkan masih tingginya tingkat kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan. Salah satu penyebab tingginya angka *backlog* perumahan ini disebabkan rendahnya pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah maupun swasta. Solusi untuk mengatasi *backlog* perumahan ini antara lain adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perumahan dan perlunya skema skema pembiayaan perumahan yang tepat.

Diperlukan peran aktif seluruh stakeholder di bidang perumahan untuk menyelesaikan permasalahan *backlog* perumahan, antara lain Pemerintah kota dalam hal perijinan dan penetapan tata ruang, pengembang untuk meningkatkan pembangunan rumah dengan harga yang terjangkau serta masyarakat itu sendiri untuk membangun rumah yang layak

huni secara swadaya. Pemerintah Kota perlu juga diharapkan untuk terus mendorong pengembang agar membangun rumah murah serta mentaati peraturan tentang pola pembangunan hunian berimbang seperti apa yang tertuang dalam RTRW Kota Balikpapan. Pengembang diharapkan tidak hanya membangun rumah mewah saja, tapi mereka juga harus ikut memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan membangun rumah sederhana.

Tingginya angka realisasi *backlog* perumahan tahun 2021 sebesar 94.039 unit, tetap menyumbang pencapaian kinerja yang sangat baik bagi Dinas Perumahan dan Permukiman.

Persentase penurunan *backlog* perumahan yang ditargetkan sebesar 75 % ternyata mampu dicapai hingga penurunan *backlog* perumahan sebesar 39,17%.

Keberhasilan pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan dengan anggaran Rp.4.155.000.000,00 mampu terealisasi Rp.3.383.523.057,12 atau sebesar 81,43%.

1. Capaian Kinerja Tahun 2022

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah

rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni. Rumus perhitungan sasaran ini adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase rumah layak huni} &= \frac{\text{Jumlah penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{0}{202.539} \times 100 \% \\
 &= 0,00\%
 \end{aligned}$$

Target kinerja tahun 2022 masih sebesar 0,00%. Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 0,00%. Formulasi indikator sasaran ini adalah untuk menunjang penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program sesuai pelayanan yang diwajibkan oleh Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Tahun 2022 belum dilakukan penyediaan rumah layak huni tersebut, namun kegiatan dari program ini sebagian besar adalah berupa pendataan dalam rangka mempersiapkan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program mulai tahun 2023 sampai dengan 2026. Berdasarkan hasil pendataan rumah yang terdampak pada tahun 2022 terdapat 74 unit yang terverifikasi untuk dilakukan penanganan pada tahun mendatang dari 225 unit rumah

terdata. Pendataan By Name By Address (BNBA) yang valid yang dilakukan pada tahun 2022 akan memicu peningkatan capaian kinerja sasaran Meningkatnya cakupan rumah layak huni ditahun yang akan datang.

Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU} &= \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{44.507}{202.539} \times 100 \% \\
 &= 21,97 \%
 \end{aligned}$$

Target kinerja sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai Tahun 2022 adalah sebesar 16,75 %. Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 21,97% dan memiliki capaian kinerja sebesar 131,19%. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan

mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU. Laju pertumbuhan penduduk memicu *backlog* perumahan di kota besar termasuk di Balikpapan sehingga dibutuhkan hunian untuk masyarakat dan pegawai yang cukup banyak. Sektor perumahan merupakan sektor yang bertumbuh positif karena memiliki efek berganda *multiplier effect* yang dapat menghidupkan 174 sub sektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, *financial*, teknologi, dan perdagangan. Bertumbuhnya sektor perumahan selain karena peningkatan iklim investasi sebagai dukungan terhadap IKN di Kalimantan Timur, juga didukung oleh adanya program sejuta rumah Kementrian PUPR yang menjadikan terfasilitasinya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah yang terfasilitasi PSU dengan baik. Peningkatan rumah yang terfasilitasi PSU tidak serta merta lepas dari pengawasan Disperkim Kota Balikpapan dalam pemenuhan kualitas dan kewajiban PSU. Ketercapaian target kinerja ini tetap memerlukan konsistensi dan komitmen antara pengembang perumahan dan Disperkim sebagai *leading sector* bidang perumahan rakyat untuk mendukung ketersediaan PSU perumahan yang memadai. Hal ini ditandai oleh komitmen pimpinan Disperkim dengan terus dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta

evaluasi penyedia perumahan dalam penyediaan PSU yang memadai.

2. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase} && \text{Jumlah Luasan} \\
 &\text{berkurangnya} && \text{Kawasan Kumuh Kota} \\
 &\text{luas kawasan} && \text{Jumlah Luasan Kumuh} && \text{X 100} \\
 &\text{kumuh=} && \text{sesuai SK Kumuh} && \% \\
 &&& \text{Walikota BPN} \\
 &&& = \frac{52.42 \text{ Ha}}{153,30\text{Ha}} \times 100\% \\
 &&& = 34,19 \%
 \end{aligned}$$

Target kinerja pengurangan luasan kawasan kumuh pada Tahun 2022 adalah sebesar 32,56 Ha. Target Penanganan kumuh tersebut ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penanganan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota. Realisasi melebihi target untuk penanganan luasan kumuh oleh Pemerintah

Pusat yang awalnya pada akhir Tahun 2022 di ramalkan hanya seluas 48,5 Ha ternyata terealisasi 51,01 Ha. Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan sangat baiknya kolaborasi penanganan kumuh Kota Balikpapan dengan Kotaku dari Kementrian PUPR . Tidak hanya itu, komitmen dari Kepala Daerah sangat mendukung percepatan pengurangan luasan kawasan kumuh sehingga permukiman layak huni Kota Balikpapan dapat tercipta secara optimal.

3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim. Sasaran ini diukur dengan melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) di unit kerja Disperkim. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim.
4. Target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim pada tahun 2022 adalah senilai 27. Realisasi yang didapat dari PMPRB Disperkim Tahun 2022 adalah 31,53. Adapun keberhasilan ini didukung oleh koordinasi internal Disperkim yang kuat dalam memenuhi area perubahan yang terdapat dalam Reformasi Birokrasi. Meskipun menjadi tahun penilaian pertama bagi Disperkim, namun komitmen pimpinan dalam menginternalisasi nilai reformasi birokrasi sangat tinggi. Komitmen Kepala Dinas dalam hal ini adalah

dengan dimuatnya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Disperkim Kota Balikpapan pada Perjanjian Kinerja Kepala Disperkim kepada Walikota Kota Balikpapan. Dengan dimuatnya hal tersebut, kinerja Kepala Disperkim dinilai berhasil jika hasil PMPRB Disperkim memenuhi target yang telah ditetapkan. Pimpinan Disperkim menilai pemenuhan nilai reformasi birokrasi yang baik merupakan modal bagi Disperkim Kota Balikpapan dalam pemberian pelayanan publik bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang baik.

2. Realisasi Kinerja Tahun 2023

- a. Sasaran I “ Meningkatkan cakupan rumah layak huni”,** dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”,** dengan realisasi sebesar **99,83** dari target **99,83** sehingga capaian sebesar **100%** dengan **kriteria”Tercapai/Sesuai Target”**.
- b. Sasaran II “ Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai” dengan Indikator** **“Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”,** terdapat realisasi sebesar **12,18%** dari target **14,5%** atau capaian sebesar **84%** dengan **kriteria “ Tidak Tercapai”**.
- c. Sasaran III” Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator** **‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh,** terdapat realisasi sebesar **36.80%** dari target **51,47%** atau capaian sebesar **71,49%** dengan

kriteria “ Tidak Tercapai”.

- d. Sasaran IV** ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dengan realisasi sebesar **72,55** dari target **75** sehingga capaian sebesar **96,75%**, dengan **kriteria “Tidak Tercapai”.**

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) indikator, yaitu:
 - a. Pada Sasaran I **“Meningkatnya cakupan rumah layak huni”**, dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”**, dengan realisasi sebesar **99,83** dari target **99,83** sehingga capaian sebesar **100%** dengan **kriteria”Sangat Tinggi”**. Adapun perolehan nilai adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcll} & \text{Jumlah} & & \\ & \text{penyediaan} & & \\ & \text{rumah layak} & & \\ & \text{huni} & \text{X} & \\ \text{Persentase rumah} & & 10 & \\ \text{layak huni} & = & \frac{\text{Jumlah total}}{\text{unit rumah}} & \\ & & \text{Kota} & \\ & & \text{Balikpapan} & \\ & & 202.188 & \\ & = & & \\ & & \text{X100 \%} & \\ & & \frac{202.539}{202.188} & \\ & = & 99.83\% & \end{array}$$

Pada target tahun 2023 terdapat 202.188 rumah layak huni dari total 202.539 unit rumah se- Kota Balikpapan (RP3KP). Hal ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan dalam Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 yaitu: 1. Kelurahan Karang Rejo 2. Kelurahan Karang Jati 3. Kelurahan Gunung Sari Ulu 4. Kelurahan Sumber Rejo 5. Kelurahan Sungai Nangka 6. Kelurahan Baru Ilir 7. Kelurahan Manggar Baru 8. Kelurahan Karang Joang 9. Kelurahan Damai 10. Kelurahan Prapatan 11. Kelurahan Klandasan Ilir.

- b. Pada sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Berdasarkan data, baru sebesar 4963 unit rumah dalam perumahan dalam hal ini adalah perumahan komersil yang difasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari 40,152 unit rumah. Adapun penilaian

indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”, terdapat realisasi sebesar **12,18%** dari target **14,5%** sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU} &= \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah dalam perumahan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{4963}{40,152} \times 100 \% \\
 &= 12.18 \%
 \end{aligned}$$

- c. Pada sasaran III Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” **dengan Indikator** ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **36.80%** dari target **51,47%** atau capaian sebesar **71,49%**, diperoleh kriteria penilaian realisasi kinerja ”sedang” atau belum tercapai karena capaian penanganan Kawasan kumuh untuk di target 2023 sebesar 3,99 sudah tercapai namun masih terdapat kawasan kumuh di atas 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pada tahun 2023 hanya terdapat penanganan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun penanganan kumuh tahun 2023 berupa Pekerjaan Penanganan

Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan berupa Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman, Perbaikan saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan. Pada tahun 2023 terdapat luasan kawasan kumuh baru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.

Perhitungan indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar 36.80% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & \quad \text{Jumlah Luasan} \\
 \text{berkurangnya luas} & \quad \text{Kawasan Kumuh} \\
 \text{kawasan kumuh} & \quad \text{Kotayang ditangani} \quad \times 100 \\
 = & \quad \frac{\text{Jumlah Luasan Kumuh}}{\text{Jumlah Luasan Kumuh}} \quad \% \\
 & \quad \text{sesuai SK Kumuh} \\
 & \quad \text{Walikota BPN} \\
 = & \quad \frac{56.41 \text{ Ha}}{153.3} \times 100\% \\
 = & \quad 36.8\%
 \end{aligned}$$

- d. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tidak tercapai 100% walaupun nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun di tahun 2022 72,55 menjadi 74.25.

Adapun penilaian setiap komponen adalah

sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,77	23,90
2	Pengukuran Kinerja	30	21,69	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,39	10,67
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	16,71	17,47

Sumber data: LHE SAKIP

3. Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. **Sasaran I “ Meningkatkan cakupan rumah layak huni”,** dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”,** dengan realisasi sebesar **99,88%** dari target **99,89%** sehingga capaian sebesar **99.98%** dengan **kriteria”tidak tercapai”**.
- b. **Sasaran II “ Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai”** dengan Indikator **“Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”,** terdapat realisasi sebesar **24.56%** dari target **20.24 %** atau capaian sebesar **121,34%** dengan **kriteria “ Melebihi Target”**.
- c. **Sasaran III” Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh”** dengan Indikator **‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh,** terdapat realisasi sebesar **88,35%** dari target **67.78%** atau capaian sebesar **130.36%** dengan **kriteria “ Melebihi Target”**.

- d. Sasaran IV** ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dengan realisasi sebesar **74,25** dari target **75** sehingga capaian sebesar **99%**, dengan **kriteria ”Tidak Tercapai”**.

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2024 terdapat seluruh indikator dengan kriteria penilaian realisasi kinerja ”Sangat Tinggi”, namun terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target 100%.
2. Adapun capaian kinerja sasaran strategis yang realisasinya $\geq 100\%$ adalah sebagai berikut:
 - a. Pada sasaran II **”Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai”** dengan **Indikator** “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”, terdapat realisasi sebesar **24.56%** dengan kriteria kinerja “sangat tinggi” dengan capaian sebesar **121.34%**, namun masih banyak PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan data, Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan sebesar 10.235 unit rumah Balikpapan dari 41.670 unit rumah pada perumahan. Terdapat 6 perumahan yang sudah di serahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan yaitu:

- 1) Balikpapan Baru
- 2) Balikpapan Permai
- 3) Tamansari Bukit Mutiara Perumahan
- 4) Balikpapan Regency
- 5) Pesona Bukit Batiuah I
- 6) Pesona Bukit Batuah 2
- 7) Sepinggian Pratama
- 8) Kumala Residence 4
- 9) Kumala Residence 5
- 10) Griya Karang Joang Asri 1
- 11) Bukit Batakan Permai
- 12) Neo Batakan Permai

Perhitungan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”, terdapat realisasi sebesar 24.56% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU} &= \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah dalam perumahan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{10.235}{41.670} \times 100 \% \\
 &= 24.56 \%
 \end{aligned}$$

b. Pada sasaran III **“Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh**, terdapat realisasi sebesar

88.35% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja ”sangat tinggi” atau capaian penanganan Kawasan kumuh sampai dengan Tahun 2024 sebesar 83.02 Ha atau sisa 21,67 Ha dari total luasan 104.69 Ha sesuai Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.

Tabel 3.7
Realisasi Penanganan Kawasan
Permukiman Kumuh

No	Kelurahan	Luas berdasar kan SK 2023	Luas Penangan Yang Telah dilakukan	Sisa Luas
1	Sepinggan raya	3.81	0	3.81
2	Gunung Sari Ulu	19.23	19.23	0
3	Gunung Sari Ulu	4.37	4.37	0
4	Gunung Sari Ulu	17.65	5.22	12.43
5	Karang Jati	4.53	4.53	0
6	Karang Jati	16.11	13.6	2.51
7	Karang Jati	11.39	11.39	0
8	Karang Rejo	1.56	1.56	0
9	Karang Rejo	0.58	0.58	0
10	Klandasan Ilir	10.39	7.47	2.92
11	Damai	3.99	3.99	0
12	Baru Ilir	6.34	6.34	0
13	Baru Ilir	1.18	1.18	0
14	Baru Ilir	3.56	3.56	0
	Total	104.69	83.02	21.67

Sumber :Bidang Permukiman

Indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **88.35%** diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh=	Jumlah Luasan Kawasan Kumuh Kotayang ditangani	X
	Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN	10 0 %
=	<u>135.44 Ha X 100%</u>	
	153, 30 Ha	
=	88.35%	

Adapun capaian yang belum 100% adalah sebagai berikut:

- Pada Sasaran I **“Meningkatnya cakupan rumah layak huni”**, dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”**, dengan realisasi sebesar **99,88%** dari target **99,89%** sehingga capaian sebesar **100.29%** dengan **kriteria”Melebihi Target”**.

Pada target tahun 2024 terdapat 202.323 rumah layak huni dari total 202.539 unit rumah se- Kota Balikpapan (RP3KP). Hal ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan dalam Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2024 Kota Balikpapan dengan target sebanyak 135 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai

stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 100 Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 1.88.45-371/2024 dan Nomor 1.88.45-437/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024. Total sampai dengan tahun 2024 sebanyak 266 unit melalui APBD sehingga masih terdapat target sampai dengan tahun 2026 sebanyak 251 Unit rumah .

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sampai Dengan Tahun 2024

BASE LINE TARGET RENSTRA s.d 2026	REALISASI			TARGET	SISA
	2022	2023	2024	2025	2026
517	66	100	100	100	151

Adapun realisasi kinerjanya diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase rumah layak huni} = \frac{\text{Jumlah penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \times 100\%$$

$$= \frac{202.323}{202.539} \times 100\%$$

$$= 99.88\%$$

- b. Pada sasaran IV **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** tidak tercapai 100% karena nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 sebesar 74.25 . Adapun penilaian setiap komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,77	23,90
2	Pengukuran Kinerja	30	21,69	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,39	10,67
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	16,71	17,47

Sumber Data: LHE SAKIP

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat kenaikan pada setiap komponen nilai. Terdapat saran rekomendasi dari Inspektorat yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam rangka mengefektifkan penerapan AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai terkait pemahaman dan komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
 - b. Agar melakukan reviu kembali atas target indikator agar terget kinerja lebih menantang.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk

mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan strategi guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Kinerja

- a. Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.

Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.9
Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2024 $7 = (6 - 5) / 5 \times 100$
				2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.83	99.89	0.06

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2024 $7 = (6-5)/5 \times 100$
				2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	12.18	24.56	101.64
3	Berkurangnya luas awasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	36.8	88.35	140.08
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	Nilai	72.55	74.25	2.34

Adapun beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian sebagai berikut :

a. Terdapat peningkatan trend realisasi pada indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bahwa terdapat perubahan rumus hitung yang sebelumnya perhitungan berdasarkan jumlah rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh Kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan kemudian ditambah terkait dukungan

perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga pada tahun 2023 terdapat kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pada tahun 2024 sebanyak 100 unit berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan dan upah tukang. Sampai dengan tahun 2024 capaian peningkatan rumah tidak layak huni sebesar 266 unit rumah dari target 571 unit rumah sehingga tersisa 251 unit rumah.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sampai Dengan Tahun 2024

BASE LINE TARGET RENSTRA s.d 2026	REALISASI			TARGET	SISA
	2022	2023	2024	2025	2026
517	66	100	100	100	151

S
Sumber: Bidang Permukiman

- 2) Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2024 Tingkat Kota Nomor 663/0018/Disperkim, bahwa capaian pengurangan

kumuh Kota Balikpapan Tahun 2023 sebesar 3,99 Ha sehingga sisa luas kumuh Kota Balikpapan menjadi 100,70 Ha dengan dasar Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan dengan luas 104,69 Ha. Pada tahun 2024 terdapat pengurangan seeluas 79.03 Ha, sehingga capaian pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2024 seluas 83.02 Ha atau sisa 21.67 Ha.

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja Penanganan Luasan
Permukiman Kumuh
Sampai Dengan Tahun 2024

BASE LINE S TARGET RENSTRA s.d 2026	REALISASI			TARGET	SISA
	S.d Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
153.3 Ha (SK 2020)	52.42 Ha	3.99 Ha	79.03Ha	2.14 Ha	15.72Ha

Sumber Data: Bidang Permukiman.

- 3) Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU, hal ini dikarenakan terdapat perubahan rumusan dimana yang sebelumnya mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal, menjadi Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Jumlah unit rumah di

perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU, yaitu mengukur jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan (perumahan komersil) yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/ developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal. Pada tahun 2022 data perhitungan PSU adalah data PSU belum diserahkan ke Pemerintah Daerah dan untuk tahun 2023 PSU yang sudah di serahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 baru sebesar 4963 unit rumah dalam perumahan yang difasilitasi PSU yang diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari total 40,152 unit rumah. Pada tahun 2024. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerinath Kota Balikpapan sebanyak 10.235 dari total 41.670.

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja Penyerahan PSU Perumahan
Sampai Dengan Tahun 2024

BASE LINE TARGET PERUBAHAN s.d 2026	REALISASI			TARGET	SISA
	S.d Tahun 2022	S.d Tahun 2023	S.d Tahun 2024	S.d Tahun 2025	S.d Tahun 2026
153.3 Ha (SK 2020)	4408 unit	4963 unit	10.235 unit	11.517 unit	14.845 unit

Sumber: Bidang Pertamanan dan Pemakaman

- 4) Nilai Sakip DISPERKIM, nilai SAKIP dalam LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 senilai 74,25 dan untuk LHE SAKIP Tahun 2024 baru akan dilakukan penilaian di bulan Juni 2025.

Adapun penilaian setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
LHE SAKIP 2023

No	Komponen yang Dinilai	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,77	30	23,90
2	Pengukuran Kinerja	30	21,69	30	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,39	15	10,67
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,71	25	17,47
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		72,55		74,25
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Sumber :LHE SAKIP

Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 72,55 dengan Predikat BB (Sangat Baik) dan di tahun 2023 meningkat dengan nilai 72.25 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sangat baik.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Capaian kinerja sasaran ini diperoleh dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Realisasi Kinerja Utama yang mengacu pada
Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{5}{6} \times 100$
1	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	Persen	99.85	100	99.85
2	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.88	100	99.88
3	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	24.56	36.42	67.44
4	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	88.35	100.00	88.35
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	Nilai	74.25	80.00	92.81

Berdasarkan Tabel 3.13 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan dari 1 indikator tujuan dan 4 indikator kinerja utama belum seluruhnya mencapai target jangka menengah pada Renstra. Adapun capaian sampai dengan 2024 jika disandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Permukiman Layak Huni dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 99.55% dan realisasi sebesar 99.85%, sedangkan pada target tahun 2026 sebesar 100% sehingga capaiannya 99.85% atau masih terdapat 0.15% untuk mencapai 100%. Target tahun 2024 untuk luasan kawasan permukiman yang layak huni 10.798,10 Ha di banding luas seluruh kawasan permukiman 10.902 Ha sedangkan realisasi sebesar 10.798,10 Ha dan target sampai dengan 2026 sebesar 100% Kawasan Permukiman Layak Huni atau 10.902 Ha.
2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan target sampai dengan tahun 2024 jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni tersedia sebanyak 202.188 dibanding seluruh jumlah unit rumah Kota Balikpapan berdasarkan RP3KP sebanyak 202.232 unit rumah sehingga capaian tahun 2024 sesuai target dan 99.89% dari target sampai dengan tahun 2026 adalah 100% seluruhnya rumah layak huni. Berdasarkan pendataan ulang di tahun 2022 terdapat 571 unit rumah

tidak layak huni dan sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 251 unit rumah tidak layak huni dari 202.539 unit rumah di Kota Balikpapan berdasarkan RP3KP Tahun 2022.

3. Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU sampai dengan tahun 2024 sebesar 20.24%. Pada tahun 2024 Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan sebanyak 10.235 dari total 41.670 diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dan terealisasi 100 %, sampai dengan tahun 2026 sebanyak 14.845 unit rumah dalam perumahan yang difasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari 40,152 unit rumah.
4. Berkurangnya luas kawasan kumuh diperoleh capaian 100% penanganan Kawasan kumuh untuk di target 2024 sebesar 79.03 Ha, namun masih terdapat kawasan kumuh di atas 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Capaian pengurangan luasan kumuh s.d Tahun 2024 sebesar 83.02 Ha atau sisa 21,67 Ha dari total luasan 104.69 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan. Target tahun 2026 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan 100% dapat tertangani.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ lainnya, dimana kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan akan disandingkan dengan capaian kinerja dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian PUPR.

Adapun perbandingan capaian kinerja Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Standar Nasional Sandingan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi SPM/ Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2024
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.88	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi SPM/ Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2024
2	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	--	57.57
3	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	24.56	--
4		Persentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU	Persen	--	46.46
5	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	89.27	--

Berdasarkan sandingan realisasi kinerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa pada Persentase pemenuhan rumah tidak layak huni terdapat perbedaan formuasi perhitungan indikator dimana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan di hitung berdasarkan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana/relokasi program pemerintah dan penyediaan bantuan stimulan penerima rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah/MBR sedangkan pada Kementerian PUPR diukur berdasarkan indikator Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU,

Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR, Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR, Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun, Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus. Selain itu pada indikator pada Disperkim Kota Balikpapan mempunyai indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU yaitu dengan menghitung jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/ developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU, dimana PSU pada perumahan komersial yang PSU nya telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan sedangkan Kementerian PUPR terdapat pengukuran indikator Persentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU diukur dengan jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU.

Tabel 3.15
Realisasi Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Standar Nasional Sandingan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Spm/ Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2024
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.88	--
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	24.56	--
3	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	89.27	--
4	Menurunnya kawasan kumuh dan tidak layak huni	Luas Kawasan Kumuh	Ha		1.097,2

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPRProvinsi Kaltim

Berdasarkan sandingan realisasi kinerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim bahwa pada Persentase pemenuhan rumah tidak layak huni terdapat perbedaan satuan hitung indikator dimana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan di hitung berdasarkan persentase penanganan kawasan kumuh dan sedangkan pada DPUPR Provinsi Kaltim Perhitungan berdasarkan hasil Jumlah luas kawasan permukiman kumuh se-Kalimantan Timur dan dikurangi dengan jumlah penanganan. Terdapat pembagian kewenangan bahwa untuk penanganan kumuh di bawah 10

Ha maka menjadi kewenangan kabupaten/kota sedangkan penanganan kumuh diatas 10-15 Ha menjadi kewenangan Provinsi.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini menguraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menyajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Predikat		
				Tidak Tercapai (<100%)	Tercapai / Sesuai Target (=100%)	Melebihi Target (>100%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkat nya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	99.98%	v		
2.	Meningkat nya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	121.34%			v

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Predikat		
				Tidak Tercapai (<100%)	Tercapai / Sesuai Target (=100%)	Melebihi Target (>100%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	130.36%			v
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Disperkim	99.00%	v		

Sumber: Bidang Perumahan, Bidang Permukiman, Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Tabel diatas menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian kinerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 dinyatakan berhasil.

Adapun analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 **“Meningkatnya cakupan rumah layak huni”**.

Sasaran ini mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program dan pemberian bantuan RTLH terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-371/2024 dan 188.45-437/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2024 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pemberian upah tukang.
- 2) Telah tersusun dokumen Updating Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana sebagai baseline data terkait pengelolaan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- 3) Telah tersusun dokumen Updating Verifikasi Data Penerima Rumah Korban Bencana Alam sebagai baseline data terkait pengelolaan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- 4) Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.
- 5) Terbangunnya SIM PKP sebagai master data perumahan dan kawasan permukiman.

b. Analisis Penyebab Kegagalan

- 1) Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-360/2024 Tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Utara, serta pergerakan tanah/longsor di Rukun Tetangga 26 kelurahan Gunung Sari Ulu, Rukun Tetangga 02 Kelurahan Mekar Sari, Rukun Tetangga 14 Kelurahan Sumber Rejo, Rukun Tetangga 02 dan Rukun Tetangga 13 Kelurahan Karang Rejo, Rukun Tetangga 02 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Rukun Tetangga 01 dan Rukun Tetangga 06 Kelurahan Telaga Sari, Rukun Tetangga 09 dan Rukun Tetangga 14 Kelurahan Prapatan, Rukun Tetangga 39 Kelurahan Sepinggan, Rukun Tetangga 31 Kelurahan Muara Rapak, Rukun Tetangga 03 Kelurahan Gunung Samarinda, dan Rukun Tetangga 44 Kelurahan Graha Indah. Pelaksanaan Kegiatan Updating Verifikasi data penerimaan rumah korban bencana alam Tahun 2024 oleh perangkat daerah Pengampu SPM Perumahan, namun hingga akhir pelaksanaan tahun anggaran, dari hasil tahapan proses

pelaksanaan SPM perumahan Tahun 2024 belum diterbitkan SK Penetapan Penerima bantuan sehingga pelaksanaan baru pemberian bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

- 2) Untuk pelaksanaan SPM Perumahan dikarenakan Program Pemerintah, Pemerintah Kota Balikpapan belum melaksanakan lebih lanjut dikarenakan belum adanya Program yang berpotensi untuk dilaksanakannya Relokasi.
- 3) Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-371/2024 dan 188.45-437/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggar 2024, sebanyak 135 unit yang bersumber dari dana APBD Tahun 2024 Kota Balikpapan, namun hanya terlaksana 100 unit dan 35 unit tidak terlaksana dikarenakan proses pengadaan tidak mencukupi waktunya di akhir tahun.

c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 1) Telah menganggarkan penanganan RTLH yang belum tertangani di tahun 2025.
- 2) Berkoordinasi dan berkolaborasi bersama perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat.
- 3) Melaksanakan SPM Perumahan Rakyat untuk penanganan korban bencana berdasarkan SK

Penerima Bantuan.

- 4) Melaksanakan rembug warga dengan perangkat daerah terkait dan warga yang terdampak korban bencana.
- 5) Sosialisasi SPM Perumahan Rakyat ke perangkat daerah terkait dan RT yang terdampak korban bencana.

2. Sasaran II **“Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai”**.

Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dalam hal ini pada perumahan komersil yaitu jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/ developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal.

Target kinerja sasaran Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai Tahun 2023 adalah sebesar 20.24% dengan capaian sebesar 121.34%. dimana terdapat 41.670 unit rumah dalam

perumahan yang telah dibangun namun baru 10.235 unit rumah dalam perumahan yang PSUnya telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan

a. Analisis Penyebab Keberhasilan

- 1) Tumbuhnya perumahan di Kota Balikpapan di dukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU.
- 2) Peningkatan rumah yang terfasilitasi PSU tidak serta merta lepas dari pengawasan Disperkim Kota Balikpapan dalam pemenuhan kualitas dan kewajiban PSU. Ketercapaian target kinerja ini tetap memerlukan konsistensi dan komitmen antara pengembang perumahan dan Disperkim sebagai *leading sector* bidang perumahan rakyat untuk mendukung ketersediaan PSU perumahan yang memadai. Hal ini ditandai oleh komitmen pimpinan Disperkim dengan terus dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyedia perumahan dalam penyediaan PSU yang memadai.
- 3) Terlaksananya sosialisasi penyerahan PSU Perumahan yang memberikan informasi kepada para pengembang agar segera menyerahkan PSU Perumahan yang menjadi kewajibannya.

- 4) Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan PSU Perumahan yang sudah di serahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan sesuai dengan perencanaan
- 5) Tersusunnya data updating pendataan PSU Perumahan Formal Wilayah Kecamatan.
- 6) Dukungan personil tim verifikasi penyerahan PSU Perumahan.

b. Analisis Penyebab Kegagalan

- 1) Belum semua prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan yang ada di Balikpapan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan.
- 2) Potensi Ketidaksesuaian pemanfaatan PSU Perumahan perlunya Kajian peningkatan fungsi hunian menjadi non hunian pada cluster perumahan.
- 3) Belum intensifnya pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU.
- 4) Masih terdapat kawasan perumahan yang belum terlayani PSU yang memadai.
- 5) Keterbatasan layanan perbaikan lampu PJU.

c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 1) Menyusun perencanaan Teknis Peningkatan PSU Perumahan TA. 2025.
- 2) Sosialisasi secara intensif kepada para pengembang untuk penyerahan PSU Perumahan.
- 3) Melakukan Pengawasan Teknis Pemeliharaan PSU Perumahan.

- 4) Monitoring PSU Perumahan yang sudah memiliki Site Plan.
- 5) Pemasangan papan pengaman PSU Perumahan.
- 6) Peningkatan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam monitoring kawasan perumahan.

3. Sasaran III **“Berkurangnya luas kawasan kumuh”**.

Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh. Target kinerja pengurangan luasan kawasan kumuh pada Tahun 2024 adalah sebesar 12.68 Ha. Pada tahun 2024 penanganan kumuh seluas 79.03.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan

- 1) Tersusunnya Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kolaborasi Dan Sinergi Penataan Permukiman Berkelanjutan, sebagai dasar pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Balikpapan
- 2) Adanya inovasi program KOTA KITA yang merupakan kolaborasi dan sinergi penataan permukiman berkelanjutan yang melibatkan seluruh stake holder terkait dalam penataan kawasan permukiman kumuh.

- 3) Mengandeng perusahaan-perusahaan, swasta dan pengembang dalam program CSR.
- 4) Tersusunnya dokumen Updating Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan di luar Kawasan Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebagai dasar penanganan kumuh.
- 5) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.
- 6) Terlaksananya Kegiatan Rakor Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang PKP.
- 7) Terlaksananya Rakor Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat serta memberikan masukan dan melakukan peran arbitrase dan mediasi.

b. Analisis Penyebab Kegagalan

- 1) Terdapat keterbatasan kewenangan penanganan kumuh antara Pemerintah Kota yang kewenangannya di bawah 10 Ha, Pemerintah Provinsi dengan kewenangan 10-15 Ha dan Pemerintah Pusat dengan kewenangan diatas 15 Ha.

- 2) Adanya penambahan penduduk dari luar kota akibat penetapan IKN di Kalimantan Timur dimana Kota Balikpapan merupakan penyangga IKN yang Potensi munculnya Kawasan kumuh Baru.

c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stake holder terkait untuk penanganan kawasan kumuh.
- 2) Sosialisasi secara intensif terkait pencegahan kawasan kumuh.
- 3) Melakukan review terhadap DED Kawasan kumuh.
- 4) Sosialisasi juknis tentang mekanisme pengusulan bantuan RTLH dan calon penerima bantuan RTLH.
- 5) Mengusulkan kembali pemberian bantuan RTLH ditahun 2025 sesuai dengan update data.
- 6) Updating data RTLH Se-Kota Balikpapan dan terintegrasi dengan SIM PKP

4. Sasaran IV **“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

Indikator diperoleh dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan dengan nilai 74.25. Evaluasi dilaksanakan

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 74.25 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan

- 1) Komitmen pimpinan untuk pencapaian target kinerja.
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal dan eksternal perangkat daerah terkait.

b. Analisis Penyebab Kegagalan

- 1) Belum seluruh pegawai memahami dokumen perencanaan perangkat daerah.
- 2) Pengukuran kinerja belum dilaksanakan tepat waktu karena adanya data kinerja yang tidak tersedia secara realtime.
- 3) Adanya perumusan Indikator program dan kegiatan yang belum sesuai.

c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 1) Melaksanakan rapat secara intensif bersama seluruh pegawai untuk meningkatkan pemahaman

terkait kinerja perangkat daerah.

- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyampaikan informasinya ke seluruh pegawai.

Adapun ringkasan faktor-faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Tabel Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong
Capaian Kinerja

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1	Adanya kerja sama dengan perangkat daerah dan instansi terkait	1	tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena bencana dan relokasi program pemerintah kabuapten/kota, karena tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana.
		2	Tersusunnya Pembuatan Naskah Akademik Perda RP3KP	2	Masih terdapat evaluasi dari Provinsi yang harus ditindaklanjuti
		3	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	3	Belum ada SK Penetapan Penerima Bantuan Bencana yang dijadikan dasar untuk memberi bantuan atau fasilitas

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
					rumah korban bencana dan atau relokasi korban pemerintah.
		4	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	4	Belum tersedianya data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara periodik
		5	Adanya kerjasama dengan Fasilitator Lapangan (TFL) Rehabilitasi dan pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	5	Banyak calon penerima belum memenuhi kriteria dikarenakan status lahan dan bangunan
		6	Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perwali Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dampak Bencana	6	Pada tahun 2023 pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan output kinerja berupa Legalisasi dokumen (Naskah Akademik),
		7	Tersusunnya draf Perwal Site Plan	7	a. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi dari perangkat daerah terkait b. Belum sesuai perencanaan perumahan dengan data topografi/kontur kawasan perumahan dan

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
					data kepemilikan lahan, adanya alih fungsi pemanfaatan lahan non komersial di dalam kawasan perumahan, rendahnya pelaksanaan pengawasan pengembangan perumahan c. Belum adanya layanan pengajuan site plan secara online
		8	Adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun	8	Belum di lakukan review
		9	Adnaya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang mengatur tarif sewa retribusi rusunawa	9	Belum di lakukan review terkait pengelolaan/tata cara sewa
		10	Adanya aplikasi SIMRUSUN untuk pengelolaan peenerimaan sewa retribusi rusunawa	10	Belum terdapat mekanisme pendaftaran sewa secara online terintegrasi dengan sim rusun
		11	Aplikasi SIM PKP	11	
		12	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Sektor Perumahan	12	

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
		13	Terlaksananya Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan dan Lingkungan	13	Belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di RUSUNAMI
		14	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan Perumahan	14	Kurangnya SDM di UPTD Rusunawa
		15	Tersusunnya (Review) Siteplan Perumahan PNS Km 7,5 Kel Graha Indah	15	Terdapat kondisi gedung Rusunawa yang tidak layak huni
				16	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait data perumahan yang berizin
				17	Masih adanya masyarakat yang membeli rumah tidak berizin
				18	Belum adanya data perumahan terintegrasi berbasis sitem informasi yang dapat diakses masyarakat
2	Berkurangnya luas kawasan kumuh	1	Adanya kerjasama dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan kawasan kumuh kota	1	tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
					pada tahun 2023
		2	Kolaborasi dan sinergi antarg perangkat daerah dan instansi terkait (POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Balikpapan)	2	tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha pada tahun 2023.
		3	Tersusunnya Penyusunan Kajian Pendataan dan Verifikasi Kumuh pada 11 Kelurahan Kota Balikpapan	3	Pada tahun 2023 terbit Kembali SK kumuh baru seluas 104.69 Ha berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, bahwa terdapat penetapan jumlah lokasi dan luasan berdasarkan kegiatan RP2KPKPK Tahun 2022.
		4	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan	4	Masih terdapat kawasan Kumuh dan Potensi munculnya Kawasan kumuh Baru

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
		5	Terlaksananya Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai	5	Masih terdapat Rumah Masyarakat yang Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan
		6	Terlaksananya Bantuan Sosial Barang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 unit	6	Belum tersedianya data lengkap rumah tidak layak huni yang terverifikasi dan update periodik secara digital
		7	Adanya kerjasama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan / Tenaga Pendamping / Surveyor Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	7	Pada tahun 2023 tidak terdapat Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dalam renja dan DPA tahun 2023.
				8	Pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dalam renja dan DPA tahun 2023.
3	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	1	Terdapat 6 PSU perumahan yang dilakukan peningkatan/pemeliharaan, yaitu perumahan Kumala Residence 4, Kumala Residence 5, Sepinggan Pratama, Taman Sari Bukit Mutiara,	1	Terdapat Pengembang belum mengajukan permohonan penyerahan PSU

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
			Balikapapan Permai, Balikpapan Baru terhadap 288 jumlah lingkungan perumahan berdasarkan pada Renstra		
		2	adanya Perwali 22/2014 ; Perwali 16/2018	2	Belum intensifnya pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU
		3	Terlaksananya Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan	3	Tingkat penyerahan PSU rendah
		4	Adanya kerjasama dengan para pengembang perumahan, perangkat daerah dan instansi/ lembaga terkait	4	Proses Penyerahan PSU masih njlimet
				5	Data kurang update dan informatif
				6.	Keterbatasan layanan perbaikan lampu PJU dikarenakan belum ada peralatan yang memadai
				7.	Masih terdapat kawasan perumahan yang belum terlayani PSU yang memadai
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Komitmen pimpinan untuk pencapaian target kinerja	1	Belum seluruh pegawai memahami dokumen perencanaan perangkat daerah

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
		2	Koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal dan eksternal perangkat daerah terkait	2	Pengukuran kinerja belum dilaksanakan tepat waktu karena adanya data kinerja yang tidak tersedia secara realtime
				3	Adanya perumusan Indikator program dan kegiatan yang belum sesuai
				4	Adanya perubahan peraturan yang menyebabkan perubahan sasaran, indikator dan target kinerja kinerja program penunjang.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 memuat analisa Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	99.88	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 -
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang telah dilakukan Pendataan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi peogram kabupaten/kota	103.37
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
					Kerusakan Rumah	
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	100
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang bersedia di Relokasi akibat Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	0%
				Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100
				Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.29
				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	100
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Kabupaten/Kota	atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0.00
				Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	100.00
				Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0.00
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	89.89

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	100.00
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	100.00
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rencana tapak	28.02
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Umum/Rumah Susun Umum	(KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	100.00
				Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rekomendasi Teknis Sarusun yang diterbitkan	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	100.00
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas	Persentase unit rumah yang sedang terbangun	121.34	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Umum yang memadai	terfasilitasi PSU		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	100,00
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun	100,00
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan	30,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100,00
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	130.36	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh	130.23
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
					Permukiman	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	100
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	107.01
				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	100
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100
				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Permukiman Kumuh	Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	153
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100
				Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	50
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	300
				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	141.67
				Perbikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	41.32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				(Sepuluh) Ha	10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	95.63
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	96.74
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.9
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105.48
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.18
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	106

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
					Konsultasi SKPD	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.49
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	93.75
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	IKM Layanan Penyediaan Jasa	93.76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.9
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41.44
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

I. Sasaran strategis **“Meningkatnya cakupan rumah layak huni”** tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Indikator kinerja program pengembangan perumahan adalah Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota. Target kinerja tahun 2024 sebesar 0.02%. Pada tahun 2024, realisasi indikator program ini adalah sebesar 0%. Formulasi indikator sub kegiatan ini adalah untuk menunjang penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program sesuai pelayanan yang diwajibkan oleh Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Pada Tahun 2024 tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena bencana dan relokasi program pemerintah kabuapten/kota, karena Hingga Akhir pelaksanaan Tahun Anggaran, dari hasil tahapan proses pelaksanaan SPM perumahan Tahun 2024 belum diterbitkan SK Penetapan Penerima bantuan, dan pelaksanaan baru akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025. namun telah dialokasikan anggaran dalam DPA Dinas

Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 untuk program tersebut.

Tingkat capaian anggaran program pengembangan perumahan mencapai 74.27% dari pagu anggaran Rp.12.885.468.000,- dan terealisasi Rp.9.569.847.949,-.

Program pengembangan perumahan terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat. Target kinerja kegiatannya adalah persentase rumah yang telah dilakukan pendataan sebesar 34 % dengan capaian 103.37%. Nilai target merupakan rumusan dari perencanaan terhadap rumah yang dilakukan pendataan sebanyak 700 unit rumah dibandingkan dengan 2.538 unit rumah di lokasi kelurahan Gunung sari ulu, Baru ulu dan Prapatan yang mencukupi untuk pemetaan rumah di lokasi rawan bencana dan relokasi di Kota Balikpapan.

Realisasi target kinerja adalah 34%, berdasarkan Laporan Updating Verifikasi Data

Perima Bantuan Korban bencana Alam 171. Berdasarkan Updating data Laporan Updating Identifikasi Perumahan pada lokasi rawan bencana 2965 (update data baru). Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar 87.63 % dari anggaran Rp.225.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.197.175.476,- .

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya :

1. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dengan realisasi keuangan sebesar 81.21 % dari anggaran Rp.75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.906.930,-. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabuapten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100% dengan hasil berupa dokumen updating pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana.
2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan realisasi keuangan sebesar 88.42 % dari anggaran Rp.100000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.906.930,-. Indikator sub kegiatan ini

adalah Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100% dengan hasil kegiatan berupa dokumen updating identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana.

3. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan realisasi keuangan sebesar 96.7 % dari anggaran Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.850.310-. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100% dengan hasil kegiatan berupa dokumen Updating Verifikasi Data Penerima Rumah Korban Bencana Alam.

b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota adalah persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi

program pemerintah. Target Renja perubahan tahun 2023 adalah sebesar 32.89 %. Hingga Akhir pelaksanaan Tahun Anggaran, dari hasil tahapan proses pelaksanaan SPM perumahan Tahun 2024 belum diterbitkan SK Penetapan Penerima bantuan, dan pelaksanaan baru akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025. sehingga realisasi target masyarakat yang bersedia di berikan bantuan adalah 0. Kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 54.34% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.182.032.679,- dari anggaran sebesar Rp.335.000.000,-.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk dan terlatih dengan target 100 orang. Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja 0% dari target 100 orang dikarenakan tidak dilaksanakan karena belum ada SK penetapan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena korban bencana. Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 0 % dari anggaran sebesar Rp.75,000,000.

2. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.

Sub kegiatan ini mempunyai indikator Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan target 200 orang dan capaian 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar 96.76% atau realisasi sebesar Rp.96,761,479 dari target Rp.100,000,000,-. Terdapat anggaran untuk belanja souvenir, honorarium dan transportasi akomodasi Sosialisasi standar teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.

3. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini mempunyai indikator Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan target 35 orang terealisasi 5 orang sehingga capaian 14.29 %. Adapun realisasi keuangan sebesar 5.42% atau realisasi sebesar Rp.3,250,000 dari target Rp.60,000,000,- hanya terealisasi

belanja makan dan minum rapat rembug warga calon penerima rumah bagi korban bencana (pertemuan 1).

4. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan

Sub kegiatan ini mempunyai indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan, dengan target 100 orang terealisasi 100 orang sehingga capaian 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar 82.02 % atau realisasi sebesar Rp.82,021,200 dari target Rp.100,000,000,-. Terdapat anggaran untuk belanja fotocopy, dokumentasi, spanduk, souvenir, honorarium dan transportasi akomodasi Sosialisasi .

c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 2.13% namun realisasi 0% dikarenakan belum terdapat SK Penetapan Penerima bantuan. Realisasi anggaran

tahun 2024 sebesar 14.11% atau Rp. 190.985.821,- dari target anggaran Rp.1.353.820.000, dengan kategori sangat rendah. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana .

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi dengan target 35 rumah dan terealisasi 0, sehingga memiliki capaian kinerja 0% dikarenakan tidak dilaksanakan karena belum ada SK penetapan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena korban bencana. Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar Rp.63,192,311 atau 6.32% dari anggaran sebesar Rp.1.000,000,000.

2. Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah dengan target 1 rumah dan terealisasi 0, sehingga memiliki capaian kinerja 0% atau tidak dilaksanakan karena belum ada SK

penetapan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena korban bencana. Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar Rp.21,447,600 atau 21.45% dari anggaran sebesar Rp.100,000,000.

3. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 rumah dan terealisasi 0, sehingga memiliki capaian kinerja 0% atau tidak dilaksanakan karena belum ada SK penetapan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena korban bencana. Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar Rp.106,345,910 atau 41.9 % dari anggaran sebesar Rp.253,820,000 yang menghasilkan Dokumen Kajian Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Pasca Kebakaran RT 09 Kel Klandasan Ulu.

d. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Indikator kegiatan ini adalah persentase hunian rusun milik pemerintah kota yang

terkelola. Target kegiatan ini adalah sebesar 78.65 %. Realisasi dari target ini adalah sebesar 80 %. Evaluasi yang dilakukan terkait tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan terdapat rusunawa yang tidak layak di huni karena kondisi lahan yang berbahaya atau miring. Adapun Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar 77,25%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.6.092.903.500,- dan terealisasi sebesar Rp.6.299.853.277.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Jumlah rumah susun yang dikelola dengan target 5 (lima) unit rusunawa yang fisiknya dilakukan peningkatan dan pemeliharaan terealisasi pemeliharaan yang terdiri atas rusunawa Sepinggian I, Beriman,

Somber, Siaga dan Km 7. Realisasi keuangan anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah sebesar Rp.5,954,448,000 dan terealisasi sebesar Rp.4,806,483,414 dengan capaian realisasi sebesar 80.72%.

2. Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Berdasarkan data keterisian hunian jumlah kamar rusunawa sebanyak 740 kamar dan terisi 592 kamar. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan terdapat gedung rusunawa yang dalam kondisi tidak layak huni karena kondisi tanah yang miring yaitu Rusunawa Manggar yang dapat membahayakan jika dihuni. Realisasi keuangan sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 75.18% yang didapat dari perhitungan realisasi keuangan Rp.1,493,369,863 terhadap anggaran sebesar Rp.1,986,510,000. Anggaran ini digunakan untuk belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor-Alat Tulis Kantor Rusunawa, Belanja Perabot Kantor Rusunawa, Belanja Pakaian Dinas Lapangan, Belanja Internet Rusunawa, Belanja Insentif tenaga Operasional dan tenaga keamanan non ASN Rusun serta sisa belanja rutin gaji tenaga non ASN Rusunawa.

e. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Kegiatan ini memiliki indikator persentase perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak. Target indikator kegiatan ini adalah sebesar 13.16%. Realisasi kegiatan sampai dengan tahun ini adalah jumlah perumahan sesuai rekomendasi rencana tapak yang diberikan adalah 10 perumahan yaitu *baseline* 2021 terdapat 7 perumahan sesuai rencana tapak dan 3 perumahan sesuai rencana tapak yang diterbitkan. Pada tahun 2024 ada 11 rekomendasi teknis yang diterbitkan. Sehingga capaian kinerja sebesar 18.13 %. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.2.626.509.695 dari anggaran sebesar Rp.2.930.690.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 89.62%.

Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan , diantaranya adalah:

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan target 1 dokumen dan realisasi 100%. Capaian indikator ini adalah 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 2,504,882,345,- dari anggaran sebesar Rp.2,780,690,000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 90.08%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah pengembangan aplikasi SIM PKP, Peningkatan Kualitas Siteplan Perumahan Terlantar, Penyusunan Baseline Data Sektor Perumahan dan Permukiman , Penataandan supervisi Lahan Hunian Perum PNS Km. 7,5 Kelurahan Graha Indah Terdapat belanja yang realisasinya 0 yaitu perjalanan dinas dalam rangka rakor pokja PKP.

- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan umum/rumah susun umum dengan target 1 dokumen dan realisasi sebesar 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 73,627,350,- dari anggaran sebesar Rp.100,000,000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 73.63%. Terdapat belanja dengan realisasi rendah yaitu belanja perjalanan dinas.

3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik dengan target 7 dokumen dan realisasi sebesar 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 48,000,000,- dari anggaran sebesar Rp.50,000,000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 96 %

f. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Rekomendasi Teknis Sarusun yang diterbitkan. Target indikator kegiatan ini adalah sebesar 3 unit dengan realisasi 0. Ketidaktercapaian target dikarenakan. Tidak terdapat penerbitan SKGB. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.73.291.000 dari anggaran sebesar Rp.100.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 73.92%.

Kegiatan ini memiliki beberapa Sub kegiatan 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) dengan target 1 laporan dan realisasi 100%. Capaian indikator ini adalah 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 73,291,000 ,- dari anggaran sebesar Rp.100,000,000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 73.29%.

II. Sasaran Strategis Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai, tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini memiliki indikator persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan dengan target kinerja 5.21 %. Berdasarkan pemutakhiran data perumahan tahun 2024, jumlah PSU Perumahan yang sudah diserahkan sebanyak 8 PSU Perumahan dari total jumlah perumahan sebanyak 204 perumahan sehingga realisasi target sebesar 3.92%. Realisasi keuangan program ini adalah sebesar 91.44% dimana realisasi keuangan adalah Rp.10.618.481.956,- dari anggaran Rp.11.612.485.600. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan memiliki indikator kinerja jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara dengan target 1 Ha dan terealisasi 100%. Capaian keuangan kegiatan ini adalah sebesar 94.70 % dimana realisasi keuangan adalah

Rp.4.692.025.137 dari anggaran
Rp.4.954.855.500,-.

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1) Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan penyediaan psu perumahan yang disusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 93.61% , yaitu dari anggaran Rp. 110.083.600,- dan terealisasi sebesar Rp.103.050.600,-.

2) Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Indikator sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian adalah Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian. Target kinerja tahun 2024 adalah 3 lokasi Pekerjaan dan tercapai 100 %. Capaian realisasi keuangan sebesar 92.04 %, yaitu dari anggaran

Rp.11.260.906.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.364.125.816,-.

- 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, dengan target kinerja 1 laporan dan terealisasi 100%. Capaian realisasi keuangan sebesar 62.65 %, yaitu dari anggaran Rp.241.496.000,- dan terealisasi sebesar Rp.151.305.540.

III. Sasaran strategis Berkurangnya luas kawasan kumuh.

Sasaran ini tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kawasan Permukiman.

Berdasarkan SK Walikota Balikpapan nomor 188.45-326/2020 tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan menyatakan bahwa luasan

kumuh kota Balikpapan adalah 153,3 Ha. Program ini memiliki sasaran untuk mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 Ha pada tahun 2026 dengan berbagi kewenangan pengurangan dengan Kementrian (Pusat) untuk pengurangan diatas 15 ha dan Provinsi Kalimantan Timur untuk pengurangan 10 -15 Ha. Berdasarkan pemetaan pada saat penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah pengurangan kawasan kumuh Kelurahan Damai seluas 5,4 Ha. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk penanagan kumuh sebesar 3.99 Ha dimana di tahun 2022 luasan kawasan kumuh yang telah tertangani seluas 1,41 Ha sehingga target 2023 seluruh luasan kumuh di bawah 10 Ha dapat tertangani dan luasan kumuh Kota Balikpapan menjadi 74.40 Ha. Adapun realisasi kinerja luasan kumuh Kota Balikpapan menjadi 96.89 Ha atau kurang dari target 74.40, hal ini karena tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha. Pada tahun 2023 terbit Kembali SK kumuh baru seluas 104.69 Ha berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan seluas 104.69 Ha, capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 83.02 Ha atau sisa 21,67 Ha. Realisasi keuangan program ini adalah Rp.3.858.376.216,- dari anggaran sebesar Rp.4.939.918.934,- dengan capaian sebesar 78.11%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman dengan target 50 % terealisasi 100%.

Kegiatan ini memiliki Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan dengan capaian 100%. Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp.478,596,634,- dan terealisasi sebesar Rp. 172,515,522,- dengan capaian realisasi 36.05 %.

- b. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Luasan (ha) Penanganan infrastruktur Kawasan Kumuh dengan target 127.88 Ha dan terealisasi 136.85 Ha sehingga capaian kinerja 107.01 %. Realisasi keuangan ini adalah sebesar Rp. 3.858.376.216 dari target Rp.4.939.918.934 atau terealisasi 69.29%.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina sebanyak 6 Kelompok Masyarakat dan terealisasi 100%. Realisasi keuangan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 85.02% , yaitu dari anggaran Rp.85,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.72,264,100,-.

2. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%. Realisasi keuangan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 72.89%, yaitu dari anggaran Rp.71,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.51,754,375,-.

3. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%. Realisasi keuangan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 65.49%, yaitu dari anggaran Rp.418,200,000,- dan terealisasi sebesar Rp.273,865,000,-.

c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani dengan

target tahun 2024 sebesar 42.44 % dan terealisasi 89.27 % yang didapat dari jumlah Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 ha yang ditangani tahun 2022 seluas 1,41 Ha dan tahun 2023 seluas 3.99 Ha terhadap 5,4 Ha kawasan kumuh di bawah 10 ha di Kelurahan Damai dan tahun 2024 sebesar 79.03 Ha. Anggaran yang terserap dari kegiatan ini adalah Rp.3.287.977.219,- dari Rp. 3.887.122.300,- atau capaian 84.59%.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki sebanyak 15 unit dan terealisasi 100%. Realisasi keuangan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 78.98% , yaitu dari anggaran Rp.834,362,100,- dan terealisasi sebesar Rp.658,989,940,-.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian

Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh sebanyak 1 laporan dan terealisasi 100%. Realisasi keuangan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 42.26% , yaitu dari anggaran Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21,130,000,-.

3. Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali sebanyak 1 Ha dan terealisasi 100%. Realisasi keuangan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 58.4% , yaitu dari anggaran Rp.308,426,600,- dan terealisasi sebesar Rp.180,124,532,-.

4. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar sebanyak 11.08 Ha dan terealisasi 100%. Realisasi keuangan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 90.16% , yaitu dari anggaran Rp.2,692,573,600,- dan terealisasi sebesar Rp2,427,732,747,-.

2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Program ini memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Target kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra Disperkim Tahun 2021-2026 adalah 0,04% dari formulasi 72 peningkatan kualitas RTLH terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan sejumlah 202.539 unit (baseline Renstra Disperkim Tahun 2021-2026). Program ini dilaksanakan di tahun 2022 dengan realisasi sebesar 0.033% atau realisasi jumlah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni diluar SK kumuh sebanyak 66 unit dan dilaksanakan kembali di tahun 2024 dengan realisasi sebesar 85 unit sehingga terealisasi sebesar 0.07% atau capaian sebesar 175%. Adapun target sampai dengan tahun 2026 adalah 0.12% atau 252 unit rumah terhadap 202539 unit rumah sehingga tersisa 101 unit. Realisasi keuangan program ini adalah 70.06% atau Rp.6.981.200.000,- terealisasi Rp.4.891.053.927,-.

IV. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran ini tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 adalah IKM Internal Perangkat Daerah dengan target kinerja 75 dan terealisasi sebesar 76.50. Realisasi skor 76.50 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.

Alokasi Anggaran program ini sebesar Rp.12,554,944,916.00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.10,937,412,019.00 atau sebesar 87.12%. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Target kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang dikeluarkan oleh Inspektorat yaitu sebesar 75 dan terealisasi 72.55 dengan tingkat capaian kinerja 96.73%. Indikator kegiatan ini telah ditarik menjadi indikator sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Sekretaris Dearah Nomor 060.4/01799/Org tanggal 22 Desember 2023 Perihal

Penyusunan Pejanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Kegiatan ini tidak memiliki anggaran.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Target kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah skor IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Disperkim sebesar 75 dan terealisasi dengan nilai 77,39 dengan tingkat capaian 103.19 % di akhir Desember 2023. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap layanan internal keuangan Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Realisasi skor 77, 39 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal keuangan Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar Sementara itu realisasi keuangan sebesar Rp. 859,680,848.00 dari pagu sebesar Rp.1,008,128,050.00 dengan tingkat capaian 85.27%.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN dengan target sebanyak 33 orang dan terealisasi sebanyak 33 orang dan terealisasi 100%. Terdapat realisasi anggaran

sebesar 79.78% dari pagu anggaran Rp.6.590.174.566 dengan realisasi sebesar Rp. 6.026.540.176

Ketidaktercapaian realisasi keuangan karena adanya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS yang sudah dialokasikan namun belum terdapat peraturan untuk penerapannya sehingga tidak dapat direalisasikan.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target skor 75 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 78.54 dengan capaian 104.72%. Realisasi skor 78.54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal administrasi umum memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.

pada TA.2023 adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 1 paket dan terealisasi sebesar 100% berupa pembelian komponen instalasi listrik/alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

battery kering) yang digunakan untuk penerangan bangunan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Realisasi anggaran sebesar 90.69% dari anggaran Rp.16.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.398.364,-. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga kontrsk.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan logistik kantor yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 1 paket dan terealisasi 1 paket atau capaian 100 %. Realisasi anggaran sebesar 89 % dari pagu anggaran Rp.418.864.100,-dengan realisasi sebesar Rp. 346.786.200,-. Terdapat belanja yang realisasinya sangat rendah yaitu belanja makanan/minuman Tamu

2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket atau capaian 100%. Realisasi anggaran sebesar 90.92% dari

pagu anggaran Rp.112.283.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.188.500,-.

3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar 109 laporan dari target 100 laporan dengan tingkat capaian 109%. Hal ini dikarenakan target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah. Realisasi keuangan sebesar 86.05 % dari pagu anggaran sebesar Rp.410.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 352.807.784,-.

4) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator kinerja sub ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6129 dengan realisasi sebesar 109 laporan dari target 6129 dokumen dengan tingkat capaian 100%. Realisasi keuangan sebesar 86.05 % dari pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.49.500.000,-.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi melebihi target dengan nilai sebesar 76.39 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 101.85 %. Realisasi nilai 76.39 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pengadaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp.424.825.652,00,- dan terealisasi sebesar Rp.439.523.200,00,- dengan capaian 96.66%.

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target kinerja 32 paket dan terealisasi sebanyak 30 paket dengan tingkat capaian kinerja 93.75%. Dalam DPPA Tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk 14 Unit pengadaan AC, switch hub, Microphone

Perlengkapan Acara, Printer A3 dan Hardisk Eksternal, Komputer PC dan Laptop, Kamera DSLR, Belanja Penghancur Kertas, Papan Tulis Standing, dan karpet.

Pagu anggaran sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah Rp.395.920.200,- dan terealisasi sebesar Rp.386.825.652,- dengan tingkat capaian 97.7%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga kontrak.

2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Mebel adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target kinerja 2 paket dan terealisasi sebanyak 2 paket dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp.43.603.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.000.000,- dengan tingkat capaian 87.15%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga kontrak.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi 75.01 dengan

tingkat capaian 100.01 %. Realisasi skor 75.01 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal penyediaan jasa penunjang Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan dari kegiatan ini memiliki tingkat capaian 93.03% dari anggaran Rp. 925.365.600,- dan terealisasi sebesar Rp.860.8530.210,-.

Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Target kinerja sebanyak 4 laporan. Realisasi kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah 100 % atau 4 laporan yang dilaporkan per triwulan.

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebesar Rp. 215.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 180.210.345- dengan tingkat capaian 83.82%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan anggaran yang tadinya akan digunakan untuk pembayaran

Berlangganan Canva Editing yang tidak terealisasi karena harga di DPA bawah harga pasar, tagihan air dan tagihan telephon yang rendah.

2) Sub kegiatan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebesar Rp.710.365.600,- dan teralisasi sebesar Rp.680.642.676,- dengan tingkat capaian sebesar 95.82%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan terdapat realisasi yang rendah pada belanja honorarium instruksi senam dan penceramah.

Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengantarget 12 laporan. Indikator ini terealisasi 100%. Sub kegiatan bertujuan untuk menyediakan bahan peralatan kebersihan, jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor dan jasa tenaga bantu administrasi non ASN yang dilaporkan per bulan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 74,32 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 99.09 %. Realisasi skor 74.32 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pemeliharaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 2.565.861.000 dan teralisasi sebesar Rp.1.997.690.873 dengan capaian 77.86%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 33 unit

kendaraan baik R2 maupun R4 yang dipegang oleh perorangan maupun jabatan. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2024 adalah 29 unit kendaraan atau terealisasi 87.88%. hal ini dikarenakan terdapat 4 unit kendaraan jabatan dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat dilakukan perbaikan.

Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah sebesar Rp 271.581.851,- dari anggaran sebesar Rp.349.931.600,- atau sebesar 77.61% dengan kriteria sangat rendah. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan kurang terjadwalnya pemeliharaan servis dan pembelian suku cadang kendaraan jabatan.

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

dengan target 2 unit dan terealisasi 2 unit kendaraan atau 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah sebesar Rp.124.216.000,- dan terealisasi sebesar Rp.91.252.502,- dengan tingkat capaian adalah 73.46 % atau kriteria capaian rendah Ketidaktercapaian realisasi keuangan disebabkan karena kurangnya penjagaan servis dan pembelian suku cadang kendaraan operasional atau lapangan.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 7 unit kendaraan dan terealisasi sebanyak 111 unit peralatan mesin yang dipelihara dengan realisasi 46 unit atau tingkat capaian 41.44%. Hal ini dikarenakan pemeliharaan mesin absen, ac, komputer, printer dan jaringan internet dengan kondisi peralatan dan mesin dalam keadaan baik sehingga tidak memerlukan banyak perawatan dan masih sebagian unit masih dalam masa garansi.

Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah sebesar Rp.95.425.800,- dan terealisasi sebesar Rp.20.697.325,- dengan tingkat capaian 21.69% atau kriteria capaian sangat rendah. Ketidaktercapaian realisasi keuangan karena lebihnya penganggaran untuk pemeliharaan mesin absensi yang masih dalam kondisi baru dan belum memerlukan pemeliharaan serta peralatan dan mesin yang lainnya masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan perbaikan. Terdapat realisasi seluruh belanja dengan kriteria sangat rendah.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi dengan target 1 unit gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan terealisasi 100% yaitu 1renovasi gedung kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah sebesar Rp.1.996.287.600,- dan terealisasi sebesar

Rp.1.614.159.195,- dengan tingkat capaian 80.86%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga kontrak.

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target skor 75 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 78.54 dengan capaian 104.72%. Realisasi skor 78.54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal administrasi umum memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan sebesar 74.32 % atau terealisasi Rp.767.821.449 dari target anggaran sebesar Rp.1.025.892.500,-.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan Indikator kegiatan adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 45 stel dan terealisasi 100%. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 29.370.000,- atau 95.07% dari target Rp.30.892.500,-.
- 2) Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan Indikator kegiatan adalah Jumlah orang yang

mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 73 pegawai dan terealisasi 100%. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.738.451.449,- atau 74.22% dari target Rp.995.000.000,-.

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta tindak lanjut untuk mengatasi kendala pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran I “Meningkatnya cakupan rumah layak huni”.

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
- b. Adanya data perumahan yang telah update.
- c. Terdapat aplikasi simrusun untuk pengelolaan retribusi sewa rusunawa.
- d. Adanya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.
- e. Adanya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.
- f. Tersusunnya Draf Perwali Petunjuk Teknis RP3KP.
- g. Adanya supervisi peningkatan kualitas gedung rusunawa
- h. Adanya penatausahaan pemanfaatan rusunawa.

- i. Adanya Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan Perumahan.
- j. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat proses bisnis, Review SOP dan standar pelayanan untuk penanganan bencana.
- b. Belum adanya peraturan internal terkait penanganan SPM urusan Bidang perumahan.
- c. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman terintegrasi.
- d. Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dan sarana prasarannya
- e. Pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif
- f. Masih adanya *backlog* kepemilikan rumah;
- g. Masih adanya rumah yang berada pada rawan risiko bencana.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Keandalan dan kelayakan yang dibangun secara swadaya perlu memperhatikan risiko bencana,
- b. Memberikan kemudahan fasilitasi perizinan

- dalam proses penyediaan perumahan
- c. Penyediaan lahan dan pembiayaan untuk sarana dan prasarana dasar dan perumahan MBR melalui penyediaan Rusunawa.
 - d. Meningkatkan kualitas layanan rusunawa
 - e. Revisi peraturan terkait pengelolaan rusunawa
 - f. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak perbankan terkait pembiayaan sewa retribusi rusunawa yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan..
 - g. Mengembangkana aplikasi SIMRUSUN bersama Diskominfo

Sasaran II “Berkurangnya luas kawasan kumuh”

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta tindak lanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

Faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
- b. Adanya data permukiman yang telah update
- c. Adanya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan
- d. Telah disusun dokumen Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan.

Faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan satandar pelayanan penanganan Kawasan kumuh.
- b. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman Terintegrasi.
- c. Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu.
- d. Belum optimalnya kolaborasi antar dinas terkait (Bappedalitbang, Dinas PU, BPBD, DPRD, dan DLH) dalam penanganan kumuh)
- e. Terdapat permukiman kumuh di atas 10 Ha-15Ha yang belum diintervensi Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang belum diintervensi Pemerintah Pusat
- f. Adanya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kota Balikpapan akibat perpindahan Ibu Kota Negara menimbulkan potensi permukiman kumuh baru.
- g. belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- h. Masih adanya permukiman illegal.
- i. Masih terdapat sarana dan prasarana permukiman yang belum terpenuhi.
- j. proses pengadaan barang dan jasa untuk

penanganan rumah tidak layak huni yang memerlukan waktu relatif lama

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan permukiman kumuh kota secara inklusif
- b. perlunya memastikan ketersediaan pasokan material sesuai dengan waktunya dan melakukan pemetaan terhadap material yang dapat disubstitusi apabila terdapat kendala dalam penanganan RTLH.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk penanganan kumuh kota.
- d. Update data perumahan dan kawasan permukiman secara periodik.

Sasaran III “Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai”

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
- b. Adanya data PSU Perumahan yang telah update
- c. Adanya verifikasi PSU Perumahan yang dilaksanakan tim verifikasi PSU.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan standar pelayanan terkait pengelolaan dan pemeliharaan PSU Perumahan.
- b. Belum dibangunnya system informasi data perumahan dan permukiman terintegrasi.
- c. Masih adanya PSU Perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan
- d. Sarana dan prasarana pemeliharaan PSU Perumahan yang belum memadai.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi secara intensif kepada pihak terkait untuk penanganan PSU Perumahan.
- b. Monitoring dan update data PSU Perumahan.
- c. Sosialisasi terkait peraturan tata cara penyerahan PSU.

Sasaran IV “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- d. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
- e. Adanya update data pertriwulan yang telah

update

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, SOP dan proses pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan dan dan evalausi data kinerja.
- b. Belum dibangunnya system aplikasi kinerja dan data keuangan yang terintegrasi.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi internal secara intensif terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing bidang.
- b. Meningkatkan koordinasi ke Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Inspektorat secara intensif terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
- c. Melakukan inovasi untuk mendukung capaian kinerja
- d. Metode pengumpulan data secara efektif dan efisien.

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2024. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja
Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	99.89 %	99.88 %	99.98 %	7,904,553,500	6,116,719,568	77.38 %	-	
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	20.24 %	24.56 %	121.34 %	11,612,485,600	10,618,481,956	91.44 %	8.56 %	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)	Ket
			Targe t	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	memadai									
3	Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	67.78 %	88.35 %	130.36 %	8,604,358,934	6,442,688,235	74.88 %	25.12 %	
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	75.00	74.25	99.00 %	12,554,944,916	10,937,412,019	87.12 %	-	
	Jumlah				88.05	45,659,017,450	37,568,430,159.24	82.28 %	17.72 %	

- a. Pada sasaran "Meningkatnya cakupan rumah layak huni sebesar 100% telah tercukupi dengan anggaran sebesar Rp.6.116.719.568 dan memiliki capaian penyerapan anggaran 77.38 % karena capaian kurang dari 100% atau 99.98%, maka dikatakan belum efisiensi.
- b. Pada sasaran "Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai" telah tercukupi dengan anggaran sebesar anggaran Rp10.618.481.956 dan memiliki capaian penyerapan anggaran 91.44 % dengan capaian kinerja sebesar 121.34% sehingga terdapat efisiensi sebesar 8.56%.
- c. Pada sasaran "Mengurangi luas kawasan kumuh" telah tercukupi dengan anggaran sebesar Rp6.442.688.235 dan memiliki capaian penyerapan anggaran 74.88 % dengan capaian kinerja sebesar 130.36% sehingga terdapat efisiensi sebesar 25.12%.
- d. Pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" , telah tercukupi dengan anggaran sebesar Rp 10.937.412.019 dan memiliki capaian penyerapan anggaran 87,12 % dengan capaian kinerja sebesar 99% sehingga tidak dikatakan efisiensi.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 82.28 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran murni sebesar **Rp.38.735.932.000,00** dan anggaran perubahan sebesar **Rp.45.659.017.450** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.37.568.430.159,24** yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Program Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
Tahun 2024

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN MURNI	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PERSENTA SE REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12,400,932,000	12,554,944,916.	10,937,412,019	1,617,532,897	87.12%

2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11,385,000,000.00	12,885,468,000.00	9,569,847,949.07	3,315,620,050.93	74.27%
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10,400,000,000.00	4,939,918,934.00	3,858,376,216.20	1,081,542,717.80	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0	3,666,200,000.00	2,584,312,018.50	1,081,887,981.50	70.49%
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4,550,000,000.00	11,612,485,600.00	10,618,481,956.47	994,003,643.53	91.44%
		38,735,932,000.00	45,659,017,450.00	37,568,430,159.24	8,090,587,290.76	82.28%

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.590.174.566,00	6.026.540.176,00	91,45
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
(2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.892.500,00	29.370.000,00	95,07
(3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	995.000.000,00	738.451.449,00	74,22
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
(4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.980.000,00	15.398.364,00	90,69
(5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.864.100,00	346.786.200,00	82,79

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
(6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.283.950,00	95.188.500,00	84,77
(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.000.000,00	352.807.784,00	86,05
(8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
(9) Pengadaan Mebel	43.603.000,00	38.000.000,00	87,15
(10) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	395.920.200,00	386.825.652,00	97,70
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
(11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.000.000,00	180.210.345,00	83,82
(12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.365.600,00	680.642.676,00	95,82
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
(13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.931.600,00	271.581.851,00	77,61
(14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	124.216.000,00	91.252.502,00	73,46
(15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.425.800,00	20.697.325,00	21,69
(16) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.996.287.600,00	1.614.159.195,00	80,86
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
(17) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	75.000.000,00	60.906.930,00	81,21
(18) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	88.418.236,00	88,42
(19) Pendataan Dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.850.310,00	95,70
1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
(20) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000,00	96.761.479,00	96,76
(21) Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	75.000.000,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
(22) Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000,00	3.250.000,00	5,42
(23) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru Dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	100.000.000,00	82.021.200,00	82,02
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
(24) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.000.000.000,00	63.192.311,00	6,32
(25) Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	21.447.600,00	21,45
(26) Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	253.820.000,00	106.345.910,45	41,90
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
(27) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5.954.448.000,00	4.806.483.414,62	80,72
(28) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	1.986.510.000,00	1.493.369.863,00	75,18
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan			
(29) Fasilitasi Penuhuan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000,00	48.000.000,00	96,00
(30) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	2.780.690.000,00	2.504.882.345,00	90,08

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
(31) Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (Kpdbu) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	100.000.000,00	73.627.350,00	73,63
1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Skgb)			
(32) Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Skbg)	100.000.000,00	73.291.000,00	73,29
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
(33) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	478.596.634,00	172.515.522,00	36,05
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
(34) Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	418.200.000,00	273.865.000,00	65,49
(35) Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	85.000.000,00	72.264.100,00	85,02

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
(36) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	71.000.000,00	51.754.375,00	72,89
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
(37) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	834.362.100,00	658.989.940,00	78,98
(38) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50.000.000,00	21.130.000,00	42,26
(39) Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	308.426.600,00	180.124.532,00	58,40
(40) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.760.000,00	0,00	0,00
(41) Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	2.692.573.600,00	2.427.732.747,20	90,16
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
(42) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.315.000.000,00	2.306.741.908,50	69,58
(43) Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	351.200.000,00	277.570.110,00	79,03
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
(44) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	110.083.600,00	103.050.600,00	93,61
(45) Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.260.906.000,00	10.364.125.816,47	92,04
(46) Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	241.496.000,00	151.305.540,00	62,65
T O T A L	45.659.017.450,00	37.568.430.159,24	82.28

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Evaluasi kinerja yang dilakukan pada laporan kinerja ini menunjukkan secara umum target kinerja dari tahun 2021-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKJIP merupakan pertanggungjawaban untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai penyelenggara urusan perumahan dan kawasan permukiman, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang

dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis terkini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2024.

Adapun beberapa simpulan keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun anggaran 2024 dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Tujuan “ Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas, dengan indikator ‘Persentase Permukiman Layak Huni, terdapat realisasi sebesar 99,84% dari target 99,55% atau capaian sebesar 100.29 % dengan predikat” Melebihi Target”.**
- b. Sasaran I “ Meningkatnya cakupan rumah layak huni”, dengan Indikator “Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”, dengan realisasi sebesar 99,88% dari target 99,89% sehingga capaian sebesar 99.98% dengan predikat” Tidak Tercapai”.**
- c. Sasaran II “ Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai” dengan Indikator “Persentase unit**

rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”, terdapat realisasi sebesar **24.56%** dari target **20.24 %** atau capaian sebesar **121,34%** dengan **predikat” Melebihi Target”**.

d. Sasaran III” Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **88,35%** dari target **67.78%** atau capaian sebesar **130.36%** dengan **predikat” Melebihi Target”**.

e. Sasaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dengan realisasi sebesar **74,25** dari target **75** sehingga capaian sebesar **99%**, dengan **predikat” Tidak Tercapai”**.

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam mencapai target kinerja tahun 2024 didukung dengan alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Tahun 2024

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
38.735.932.000,00	45.659.017.450	37.568.430.159,24	82.28

Faktor-Faktor Penghambat, Pendorong dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja.

Sasaran I “Meningkatnya cakupan rumah layak huni”

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
- b. Adanya data perumahan yang telah update.
- c. Terdapat aplikasi simrusun untuk pengelolaan retribusi sewa rusunawa.
- d. Adanya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.
- e. Adanya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.
- f. Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik dan Perwali Petunjuk Teknis RP3KP.
- g. Adanya supervisi peningkatan kualitas gedung rusunawa.
- h. Adanya penatausahaan pemanfaatan rusunawa.
- i. Adanya Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan Perumahan.
- j. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat proses bisnis, Review SOP dan standar pelayanan untuk penanganan bencana.
- b. Belum adanya peraturan internal terkait penanganan SPM urusan Bidang perumahan.
- c. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman terintegrasi.
- d. Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dan sarana prasarannya.

- e. Pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif.
- f. Masih adanya *backlog* kepemilikan rumah.
- g. Masih adanya rumah yang berada pada rawan risiko bencana

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Keandalan dan kelayakan yang dibangun secara swadaya perlu memperhatikan risiko bencana,
- b. Memberikan kemudahan fasilitasi perizinan dalam proses penyediaan perumahan
- c. Penyediaan lahan dan pembiayaan untuk sarana dan prasarana dasar dan perumahan MBR melalui penyediaan Rusunawa.
- d. Meningkatkan kualitas layanan rusunawa
- e. Revisi peraturan terkait pengelolaan rusunawa
- f. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak perbankan terkait pembiayaan sewa retribusi rusunawa yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan.
- g. Mengembangkan aplikasi SIMRUSUN bersama Diskominfo

Sasaran II “Berkurangnya luas kawasan kumuh”

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta tindak lanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

Faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
- b. Adanya data permukiman yang telah update
- c. Adanya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan

Faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan satandar pelayanan penanganan Kawasan kumuh.
- b. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman Terintegrasi.
- c. Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu.
- d. Belum optimalnya kolaborasi antar dinas terkait (Bappedalitbang, Dinas PU, BPBD, DPPR, dan DLH) dalam penanganan kumuh)
- e. Terdapat permukiman kumuh di atas 10 Ha-15Ha yang belum diintervensi Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang belum diintervensi Pemerintah Pusat
- f. Adanya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kota Balikpapan akibat perpindahan Ibu Kota Negara menimbulkan potensi permukiman kumuh baru.
- g. belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- h. Masih adanya permukiman illegal.

- i. Masih terdapat sarana dan prasarana permukiman yang belum terpenuhi.
- j. proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan rumah tidak layak huni yang memerlukan waktu relatif lama
- k. Penyusunan Dokumen Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan permukiman kumuh kota secara inklusif
- b. perlunya memastikan ketersediaan pasokan material sesuai dengan waktunya dan melakukan pemetaan terhadap material yang dapat disubstitusi apabila terdapat kendala dalam penanganan RTLH.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk penanganan kumuh kota.
- d. Update data perumahan dan kawasan permukiman secara periodik.

Sasaran III “Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai”

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
- b. Adanya data PSU Perumahan yang telah update
- c. Adanya verifikasi PSU Perumahan yang dilaksanakan tim verifikasi PSU.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan standar pelayanan terkait pengelolaan dan pemeliharaan PSU Perumahan.
- b. Belum dibangunnya system informasi data perumahan dan permukiman terintegrasi.
- c. Masih adanya PSU Perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan.
- d. Sarana dan prasarana pemeliharaan PSU Perumahan yang belum memadai.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi secara intensif kepada pihak terkait untuk penanganan PSU Perumahan.
- b. Monitoring dan update data PSU Perumahan.
- c. Sosialisasi terkait peraturan tata cara penyerahan PSU .

Sasaran IV “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, diantaranya sebagai berikut:

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
- b. Adanya update data pertriwulan yang telah update

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, SOP dan proses pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan dan dan evalausi data kinerja.
- b. Belum dibangunnya system aplikasi kinerja dan data keuangan yang terintegrasi.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi internal secara intensif terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing bidang.
- b. Meningkatkan koordinasi ke Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Inspektorat secara intensif terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
- c. Melakukan inovasi untuk mendukung capaian kinerja
- d. Metode pengumpulan data secara efektif dan efisien

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif semua pegawai dan instansi yang terkait. Semoga Laporan kinerja (LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa pencapaian tujuan, saasaran,

program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selanjutnya.

Balikpapan, 28 Februari 2025

**Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan**

RAFIUDDIN, ST., MT

Lampiran Bukti Dukung Kegiatan Tahun 2024





